

ABSTRACT

Forests as an ecosystem unit in the form of an expanse of land containing biological natural resources dominated by trees in a natural environment that cannot be separated from each other have many benefits for human life, both directly and indirectly. One form of indirect utilization is agroforestry activities as a forest land management system that combines the production of agricultural crops and forest plants or animals simultaneously or sequentially on the same land unit. The Alitta City Forest is often used by the community in the economic and agroforestry sectors. From the results of field observations, it is known that this area is an area of former livestock grazing, plantations and several local business activities that utilize forest conditions and products to improve their standard of living. This is of particular concern to researchers who currently do not have specific regulations regarding structured forest use and management. The condition of the forest is continuously used by local residents. This research method uses descriptive, with a purposive sample form according to research needs. The research results show that the characteristics of the Alitta City Forest are significant for the development of forest management in the agroforestry sector. Next, a description of the potential for development of the agribusiness-based agroforestry sector in the Alitta City Forest Area, including: The main actors in the potential development of the agribusiness-based agroforestry sector, the main factors causing the weak coordination function in the potential development of the agribusiness-based agroforestry sector and the most effective strategy program in the potential Development of the Agribusiness-based Agroforestry Sector in the Alitta City Forest Area.

Keywords: Urban Forest, Agroforestry, Agribusiness

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Hutan dalam fungsinya sebagai penyedia pangan (*forest for food production*) diperoleh melalui pemanfaatan langsung plasma nutfah flora dan fauna untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu secara tidak langsung kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk memproduksi sumber pangan (Hasan, 2010).

Salah satu bentuk pemanfaatan secara tidak langsung adalah kegiatan agroforestri sebagai suatu sistem pengelolaan lahan hutan yang mengkombinasikan produksi tanaman pertanian dan tanaman hutan dan/atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat (Departemen Kehutanan, 2017).

Kegiatan agroforestri di kawasan hutan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan tetap mempertahankan kondisi hutan. Kegiatan agroforestri juga dilakukan sebagai kegiatan untuk rehabilitasi hutan karena sifat kegiatan agroforestri yang konservatif dan protektif. Manfaat-manfaat langsung yang didapat melalui agroforestri dapat memberikan manfaat yang bersifat jangka panjang, seperti peningkatan produktivitas tanaman, tata guna lahan yang lebih mantap dan perbaikan konservasi lingkungan. Karena itu, bila dilaksanakan dengan baik, sistem agroforestri dapat merupakan alat yang efektif untuk merehabilitasi dan mengelola lahan-lahan dan menggalakkan pembangunan di pedesaan (Mayrowani dan Ashari, 2011).

Namun, keberhasilan pembangunan kehutanan melalui kegiatan agroforestri sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap upaya pengelolaan hutan dan kualitas sumberdaya manusia

yang mendukungnya. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan kegiatan agroforestri dan upaya rehabilitasi lahan agar maju dan mandiri sebagai pelaku pembangunan kehutanan mutlak dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri sebagai pelaku pembangunan kehutanan, maka hal yang sangat penting dilaksanakan adalah membangun, memperkuat dan mengembangkan kelembagaan masyarakat yang terkait dengan kegiatan pembangunan kehutanan (Departemen Kehutanan, 2017).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/ Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, KPH telah menjadi inti dari kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. KPH telah ditunjuk secara khusus sebagai instrumen utama untuk mereformasi sektor kehutanan dalam negeri (Sahide, 2016).

Berdasarkan SK Menteri LHK tentang penetapan wilayah KPH Provinsi, kawasan hutan lindung dan hutan produksi dibagi ke dalam 529 unit KPHP/L yang mencakup areal seluas 84,859 juta ha. Paska Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis, maka berdasarkan Peraturan Gubernur telah ditetapkan sebanyak 325 Unit KPH dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di seluruh Indonesia (KPH Menlhk, 2019).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.88/Menhut- II/2011, terdapat 10 wilayah KPH di Sulawesi Selatan, yaitu KPH Bila, KPH Jeneberang, KPH Kalaena, KPH Noling-Gilireng, KPH Larona Malili, KPH Maros-Sawitto, KPH Rongkong, KPH Saddang, KPJH Selayar, dan KPH Walanae. Mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, kawasan hutan Kabupaten Wajo

masuk di dalam dua wilayah KPH yaitu sebagian berada di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit V yang wilayahnya mencakup 7 wilayah kabupaten (Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Palopo, Sidrap, Tator, Wajo) dan sebagian berada di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI yang wilayahnya juga mencakup 7 kabupaten (Barru, Bone, Gowa, Maros, Sidrap, Soppeng, Wajo) (Simpasdok Kph, 2019). Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 / 19/01/2018 menetapkan SK kelembagaan dan tanggal penetapan KPH Bila, dikelola sebagai KPH Lindung (KPHL) berfungsi utama sebagai perlindungan tata air yang tetap membuka akses pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal (KPH Menlhk, 2019).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bila merupakan salah satu otorisasi pengelolaan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR) kepada 5 kecamatan dengan 11 desa yaitu luas keseluruhan 7203.23 Ha. (KPH Menlhk, 2019).

Kondisi sosial masyarakat menggantungkan hidupnya dari pengelolaan lahan baik sebagai petani maupun buruh tani. Kegiatan pertanian dilakukan pada sawah basah, lahan kering atau keduanya. Petani pada lahan basah sangat rawan mengalami gagal panen karena daerah ini merupakan daerah rawan kekeringan. Maka dari itu, banyak masyarakat di sana yang bertani pada lahan kering atau petani hutan. Lahan petani sekarang banyak ditanami dengan tanaman kayu seperti jati, bitti, eboni, pinus, dan non-kayu aren, bambu, rotan, kemiri, dan jambu mete. Penanaman tanaman berkayu secara tidak langsung dapat membantu melindungi tanah agar tidak terjadi longsor karena tanaman berkayu memiliki sistem perakaran yang kuat (Marwoto, 2012).

Masyarakat menanam dengan menggunakan pola agroforestri yang mengkombinasikan tanaman pertanian dan kehutanan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu mengoptimalkan pengolahan lahan secara berkelanjutan guna menjamin kebutuhan hidup masyarakat, dan meningkatkan daya dukung ekologi utamanya di pedesaan (Mayrowani dan ashari, 2011).

Salah satu upaya pengembangan dalam agribisnis bidang agroforestri adalah peran lembaga dan stakeholder terkait, potensi pengembangan tidak terlepas dari posisi lembaga-lembaga terkait terutama dalam peran dan kontribusi lembaga-lembaga pemerintah dalam mengupayakan pengembangan dan distribusi potensi agroforestri di kawasan Hutan Kota Alitta.

Masing-masing lembaga dan stakeholder memiliki perannya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat yang berada di kawasan hutan. Pembagian peran dikelompokkan menjadi beberapa peran, yaitu sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer dan akselerator. Berdasarkan teori dari Nugroho & Zauhar, (2014), mengartikan *Policy Creator* sebagai pihak yang memiliki peran sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Koordinator merupakan stakeholder yang mengkoordinasi segala kebutuhan dan kepentingan masing-masing stakeholder yang terkait dalam pengembangan agroforestry.

Berdasarkan data Pusat Statistik Kota Parepare salah satu kawasan yang masuk dalam KPH Bila adalah Hutan Kota Alitta yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bidang ekonomi dan agroforestri. Hutan Kota Alitta, berada pada ketinggian tempat 26- 48 m dpl, dan memiliki bentuk wilayah dengan topografi landai dan sedikit berbukit. Hasil identifikasi lapang di Kawasan Alitta menunjukkan adanya 11 jenis vegetasi yang sebagian bukan merupakan jenis lokal, kecuali jenis barana (*Ficus drupacea*), kayu tarra (*Artocarpus incise*), kesambi (*Schleichera oleosa*), dan jenis kanunang (*Cordia dichotoma*). Selain jenis-jenis tersebut merupakan hasil pengayaan, karena kawasan lebih didominasi oleh rumput dan tanaman *cover crop* lainnya.

Dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa kawasan ini merupakan areal bekas pengembalaan ternak, perkebunan dan beberapa kegiatan usaha warga yang sifatnya memanfaatkan kondisi dan hasil hutan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi peneliti khususnya kondisi Hutan Kota Alitta saat ini belum memiliki regulasi khusus dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara terstruktur. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi hutan yang dimanfaatkan secara terus menerus oleh penduduk setempat.

Berdasarkan uraian diatas mendasari motivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: “Analisis Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri Berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, Kecamatan Soreang, Kota Parepare”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan karakteristik Hutan Kota Alitta saat ini?
2. Bagaimana deskripsi potensi dan pola pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagai permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji karakteristik dan pola pengelolaan agroforestri berbasis Agribisnis di kawasan Hutan Kota Alitta.
2. Mendeskripsikan potensi pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di wilayah pengelolaan dan pengembangan, masyarakat sekitaran Hutan Kota Alitta dan para akademisi yang bergerak dibidang agribisnis pertanian, dalam hal:

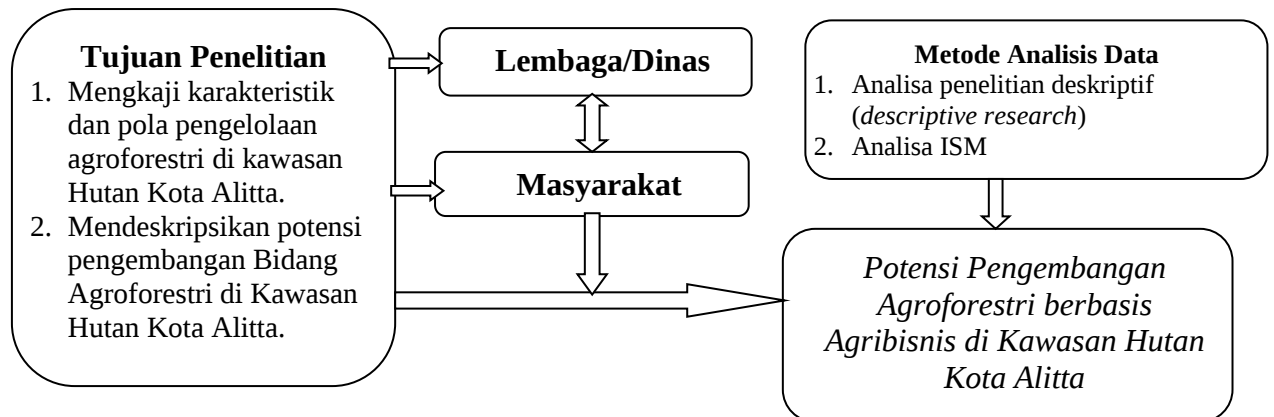
1. Diperolehnya informasi terkait dengan karakteristik dan pola pengelolaan pemanfaatan agroforestri di kawasan Hutan Kota Alitta.
2. Bagi akademisi sebagai sebagai bahan referensi penelitian sejenis dan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan agribisnis, kehutanan dan kelembagaan.

3. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait di tempat penelitian, dapat memberikan masukan sebagai sumber informasi untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan di bidang agroforestri yang dapat diterapkan untuk peningkatan kesejahteraan dan pelaksanaan rehabilitasi hutan.
4. Bagi peneliti lain sebagai pustaka informasi serta referensi untuk pengembangan penelitian yang berkaitan dengan agribisnis, kehutanan dan kelembagaan.

1.5. Kerangka Pikir Penelitian

Sebagai kerangka pendekatan dalam penelitian ini, disusunlah gambar kerangka pikir secara umum, melalui dari latar belakang hingga ke masalah-masalah yang akan dianalisis dalam bentuk kerangka pikir penelitian.

Penelitian ini berupaya mengkaji analisis potensi pengembangan bidang agroforestri di Kawasan Hutan Kota Alitta. Adapun kerangka acuan penelitian dapat dilihat seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hutan dan Pengelolaannya

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kehutanan, secara konsepsional hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan memiliki banyak manfaat terutama karena hutan merupakan paru-paru dunia (planet bumi) sehingga perlu dijaga karena jika tidak maka hanya akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan, baik di masa kini dan masa yang akan datang.

Beberapa manfaat dan fungsi hutan di Indonesia sebagai berikut:

1. Manfaat dan Fungsi Ekonomi
 - a. Hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi.
 - b. Membuka lapangan pekerjaan bagi pembalak hutan legal.
 - c. Menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri.
2. Manfaat dan Fungsi Klimatologis
 - a. Hutan dapat mengatur iklim.
 - b. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan.
3. Manfaat dan Fungsi Hidrologis
 - a. Dapat menampung air hujan di dalam tanah.
 - b. Mencegah intrusi air laut yang asin.
 - c. Menjadi pengatur tata air tanah.
4. Manfaat dan Fungsi Ekologis
 - a. Mencegah erosi dan banjir.
 - b. Menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah.
 - c. Sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

Penyelenggaraan kehutanan atau sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan diselenggarakan secara terpadu dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan tujuan dari penyelenggaraan kehutanan.

Dalam tentang Kehutanan disebutkan bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk ikut mengelola kawasan hutan sebagai alternatif bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat. Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan mencanangkan program *social forestry* sebagai upaya perbaikan kondisi hutan di Indonesia sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Salah satu bagian dari program ini adalah kegiatan *agroforestry*.

2.2. Pengertian Agribisnis

Agribisnis dalam arti sempit diartikan sebagai perdagangan atau pemasaran hasil pertanian yang berusaha memaksimalkan keuntungan. Dalam arti luas, agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mulai mata rantai produksi, pengolahan dan pemasaran hasil yang ada hubungannya dengan komoditi pertanian dalam arti luas (usahatani, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Dengan kata lain, agribisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan yang meliputi sebagian atau seluruh sektor agribisnis, yaitu sektor masukan, sektor produksi, sektor pengeluaran (Gunawan, 2013).

Pengertian Agribisnis Menurut Downey and Erickson (1987) dalam Gunawan (2013), agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (*agroindustri*), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

Pengertian Agribisnis menurut Wibowo dkk (1994) dalam Gunawan (2013), agribisnis mengacu kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistim pertanian yang memiliki beberapa komponen sub sistim yaitu, sub sistim usaha tani/yang memproduksi bahan baku; sub sistim pengolahan hasil pertanian, dan sub sistim pemasaran hasil pertanian.

Pengertian Agribisnis menurut Austin, agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usahatani, pengolahan bahan makanan, usaha saran dan prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, kestabilan pangan dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk distribusi bahan pangan dan serat-seratan kepada konsumen. Pengertian Agribisnis menurut Drillon, agribisnis adalah sejumlah total dari seluruh kegiatan yang menyangkut manufaktur dan distribusi dari sarana produksi pertanian, kegiatan yang dilakukan usahatani, serta penyimpanan, pengolahan dan distribusi dari produk pertanian dan produk-produk lain yang dihasilkan dari produk pertanian. Pengertian Agribisnis menurut Cramer and Jensen, agribisnis adalah suatu kegiatan yang sangat kompleks, meliputi: industri pertanian, industri pemasaran hasil pertanian dan hasil olahan produk pertanian, industri manufaktur dan distribusi bagi bahan pangan dan serat-seratan kepada pengguna/konsumen (Gunawan, 2013).

Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir sektor pangan (*food supply chain*). Dengan kata lain, agribisnis adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Dalam konteks manajemen agribisnis, setiap elemen dalam produksi dan distribusi pertanian adalah sebagai aktivitas agribisnis. Istilah agribisnis atau agribusiness, merupakan gabungan dari agriculture (pertanian) dan business (bisnis). Dalam bahasa Indonesia dikenal pula agrobisnis. Obyek agribisnis dapat berupa tumbuhan, hewan, ataupun organisme lainnya (Sieva, 2015).

Kegiatan budidaya merupakan inti (*core*) agribisnis, meskipun suatu perusahaan agribisnis tidak harus melakukan sendiri kegiatan ini. Apabila produk budidaya (hasil panen) dimanfaatkan oleh pengelola sendiri, kegiatan ini disebut pertanian subsisten, dan merupakan kegiatan agribisnis paling primitif.

Pemanfaatan sendiri dapat berarti juga menjual atau menukar untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Dalam perkembangan masa kini agribisnis tidak hanya mencakup kepada industri makanan saja karena pemanfaatan produk pertanian telah berkaitan erat dengan farmasi, teknologi bahan, dan penyediaan energi. FAO memiliki bagian yang beroperasi penuh pada pengembangan agribisnis yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri pangan di negara berkembang (Sieva, 2015).

2.3. Agroforestri

2.2.1. Pengertian Agroforestri

Agroforestri merupakan manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta (Departemen Kehutanan, 2014). Dalam sistem *agroforestry* terdapat interaksi antara ekologi dan ekonomi diantara komponen-komponen yang berbeda.

2.2.2. Bentuk Agroforestri

Beberapa bentuk agroforestri adalah sebagai berikut (Departemen Kehutanan, 2014).

1. *Agrisilviculture* yaitu penggunaan lahan secara sadar dan dengan pertimbangan yang matang untuk memproduksi sekaligus hasil-hasil pertanian dan kehutanan.
2. *Sylvopastural system*, yaitu sistem pengelolaan lahan hutan untuk menghasilkan kayu dan untuk pemeliharaan ternak.

3. *Agrosylvo-pastoral system* yaitu sistem pengelolaan lahan hutan untuk memproduksi hasil pertanian dan kehutanan secara bersamaan dan sekaligus pemeliharaan hewan ternak.
4. *Multipurpose forest tree production systems*, yaitu sistem pengelolaan dan penanaman berbagai jenis kayu yang tidak hanya untuk hasil kayunya, akan tetapi juga daun-daunan dan buah-buahan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan manusia ataupun pakan ternak.

2.2.3. Ciri Agroforestri

Beberapa ciri penting *agroforestry* (Departemen Kehutanan, 2014) adalah:

1. *Agroforestry* biasanya tersusun dari dua jenis tanaman atau lebih (tanaman dan/atau hewan), minimal satu diantaranya tumbuhan berkayu.
2. Siklus sistem *agroforestry* selalu lebih dari satu tahun.
3. Ada interaksi (ekonomi dan ekologi) antara tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu.
4. Selalu memiliki dua macam produk atau lebih (*multi product*).
5. Minimal mempunyai satu fungsi pelayanan jasa (*service function*), misalnya penabung, pelindung dari angin, penyubur tanah atau peneduh.
6. Sistem *agroforestry* yang paling sederhana pun secara biologis (struktur dan fungsi) maupun ekonomis jauh lebih kompleks dibandingkan sistem budaya monokultur.

Menurut Ohorella (2004), *Agroforestry* memiliki beberapa keunggulan baik dari segi ekologi/lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan politik yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki stabilitas ekologi yang tinggi karena *agroforestry* memiliki multijenis:
 - a. Multi jenis: memiliki keanekaragaman hayati yang lebih banyak atau memiliki rantai makanan/energi yang lebih lengkap.
 - b. Multi strata tajuk, dapat menciptakan iklim mikro dan konservasi tanah dan air yang lebih baik.
 - c. Kesenambungan vegetasi, sehingga tidak pernah terjadi keterbukaan permukaan tanah yang ekstrim, yang merusak kesinambungan ekologi.

- d. Penggunaan bentang lahan secara efisien.
- 2. Memiliki keunggulan ekonomi, yakni memberi kesejahteraan kepada petani relatif lebih tinggi dan berkesinambungan, karena *agroforestry* memiliki:
 - a. Tanaman yang ditanam lebih beragam, biasanya dipilih jenis-jenis tanaman yang mempunyai nilai komersial dengan potensi pasar yang besar.
 - b. Kebutuhan investasi yang relatif rendah, atau mungkin dapat dilakukan secara bertahap.
- 3. Keunggulan sosial budaya yang berhubungan dengan kesesuaian (*adaptability*) yang tinggi dengan kondisi pengetahuan, keterampilan dan sikap budaya masyarakat petani, karena memiliki:
 - a. Teknologi yang fleksibel, dapat dilaksanakan dari sangat intensif untuk masyarakat yang sudah maju sampai kurang intensif untuk masyarakat yang masih tradisional dan subsisten.
 - b. Kebutuhan input, proses pengelolaan sampai jenis *agroforestry* umumnya sudah sangat dikenal dan biasa dipergunakan oleh masyarakat setempat.
 - c. Filosofi budaya yang efisien, yakni memperoleh hasil yang relatif besar dengan biaya atau pengorbanan yang relatif kecil.
- 4. Keunggulan politis karena dapat memenuhi hasrat politik masyarakat luas dan kepentingan bangsa secara keseluruhan, yakni:
 - a. *Agroforestry* dapat dan sangat cocok dilakukan oleh masyarakat luas, adanya pemerataan kesempatan usaha serta menciptakan struktur *supply* yang lebih kompetitif.
 - b. Dapat meredakan ketegangan atau konflik politik yang memanas akibat ketimpangan peran antar golongan dan ketidakadilan ekonomi.
 - c. Kepercayaan yang diberikan masyarakat akan direspon dengan rasa memiliki dan menjaga sumber daya hutan/lahan yang memberi manfaat nyata kepada mereka.

Tujuan akhir program *agroforestry* adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat petani, terutama yang berada di sekitar hutan, yaitu dengan memprioritaskan partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki keadaan lingkungan yang rusak dan berlanjut dengan memeliharanya (Mayrowani dan Ashari, 2011). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *agroforestry* adalah suatu

sistem penggunaan lahan dengan suatu tujuan produktifitas tertentu, yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Agar kegiatan *agroforestry* dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka kegiatan ini perlu dikemas dalam kerangka bisnis *agroforestry* (agribisnis).

Menurut Departemen Kehutanan (2014), pengembangan *agroforestry* harus direncanakan sejak semula, sebagai suatu bagian integral dari sistem agribisnis *agroforestry* di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian dalam sistem bisnis *agroforestry* merupakan suatu kesatuan sistem, baik sub-sistem produksi, maupun subsistem lainnya yang menyangkut pemberian *input*, proses pasca panen dan pemasaran. Di samping itu, pengembangan sistem bisnis *agroforestry* akan berjalan lancar jika ditopang oleh sarana dan prasarana dan pengembangan kelembagaan yang sesuai.

2.4. *Agroforestry* sebagai Subsistem Agribisnis

Agribisnis merupakan suatu kegiatan usaha ekonomi/bisnis yang berkaitan dengan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang merupakan sektor usaha berbasis sumberdaya (*resource base*) (Saragih, 2010). Agribisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor bisnis pertanian, mencakup perusahaan-perusahaan pemasok input agribisnis (*upstream-side industries*), penghasil (*agricultural-producing industries*), pengolah produk agribisnis (*downstream-side industries*) dan jasa pengangkutan, jasa keuangan (*agri-supporting industries*). Sementara itu agribisnis secara umum mengandung pengertian sebagai keseluruhan operasi yang terkait dengan aktivitas untuk menghasilkan dan mendistribusikan input produksi, aktivitas untuk produksi usaha tani, untuk pengolahan dan pemasaran.

Menurut Saragih (2010), agribisnis merupakan suatu cara lain untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari empat subsistem yang terkait satu sama lain yaitu sebagai berikut:

1. Subsistem agribisnis hulu yang mencakup semua kegiatan untuk memproduksi dan menyalurkan input-input pertanian dalam arti luas.
2. Subsistem agribisnis usaha tani merupakan kegiatan yang dikenal sebagai kegiatan usaha tani, yaitu kegiatan di tingkat petani, pekebun, peternak dan

nelayan termasuk pula kegiatan kehutanan yang mengelola input-input (lahan, tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen) untuk menghasilkan produk pertanian.

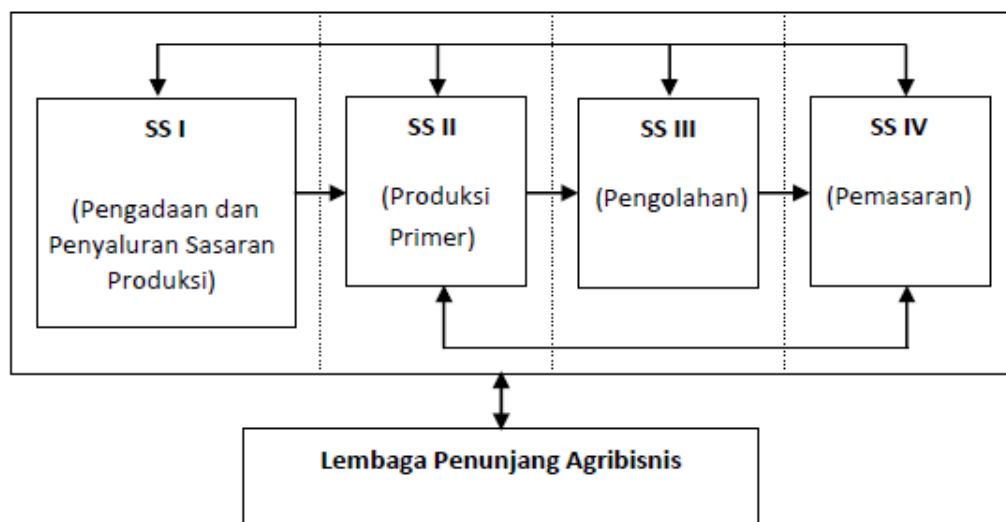
3. Subsistem agribisnis hilir, yang sering disebut sebagai kegiatan agroindustri atau kegiatan industri yang menggunakan produk pertanian sebagai bahan baku.
4. Subsistem jasa penunjang (*supporting institution*), yaitu kegiatan jasa yang melayani pertanian seperti kebijakan pemerintah, perbankan, penyuluhan, pembiayaan dan lain-lain.

Usaha di bidang pertanian di Indonesia bervariasi dalam corak dan ragam. Berdasarkan segi skala usaha, ada yang berskala besar (seperti perusahaan perkebunan, industri minyak sawit, dan lain-lain), ada yang berskala menengah (seperti beberapa agroindustri menengah dan perkebunan menengah), serta ada yang berskala kecil (seperti usaha tani-usaha tani dengan luas lahan di bawah 25 hektar dan berbagai industri skala rumah tangga). Namun, apabila dikaji dari jumlah usahanya, maka usaha berskala kecil adalah yang paling banyak. Diperkirakan jumlahnya mencapai 90% dari seluruh usaha agribisnis di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan sektor agribisnis hendaknya terus dikembangkan dengan pendekatan sistem agribisnis yang berorientasi pada komersialisasi usaha atau industri pedesaan dan pertanian rakyat yang modern (Said, 2004).

Pengembangan agribisnis tidak akan efektif dan efisien bila hanya mengembangkan salah satu subsistem yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, pengembangan usaha budidaya di suatu daerah sangat berhasil dalam meningkatkan produksi dan mutu produknya, tetapi tidak berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat secara nyata karena tidak disertai dengan pengembangan dan penyiapan sistem pemasarannya. Dengan demikian, produksi yang melimpah hanya akan menjadi busuk di lahan atau di tong sampah dan produsennya merasa sangat kecewa. Contoh tersebut menjadi salah satu fenomena pengembangan agribisnis yang tidak terpadu dan sering terjadi di Indonesia.

Di lain pihak persyaratan-persyaratan untuk memiliki wawasan agribisnis adalah sebagai berikut:

1. Memandang agribisnis sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa subsistem. Sistem tersebut akan berfungsi baik apabila tidak ada gangguan pada salah satu subsistem (Gambar 2). Pengembangan agribisnis harus mengembangkan semua subsistem di dalamnya karena tidak ada satu subsistem yang lebih penting dari subsistem lainnya.
2. Setiap subsistem dalam sistem agribisnis mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan. Tanda panah ke belakang ke kiri pada subsistem pengolahan (SS-III) menunjukkan bahwa SS-III akan berfungsi dengan baik apabila ditunjang oleh ketersediaan bahan baku yang dihasilkan oleh SS-II. Tanda panah ke depan (ke kanan) pada SS-III menunjukkan bahwa subsistem pengolahan (SS-III) akan berhasil dengan baik jika menemukan pasar untuk produksinya (Gambar 1).



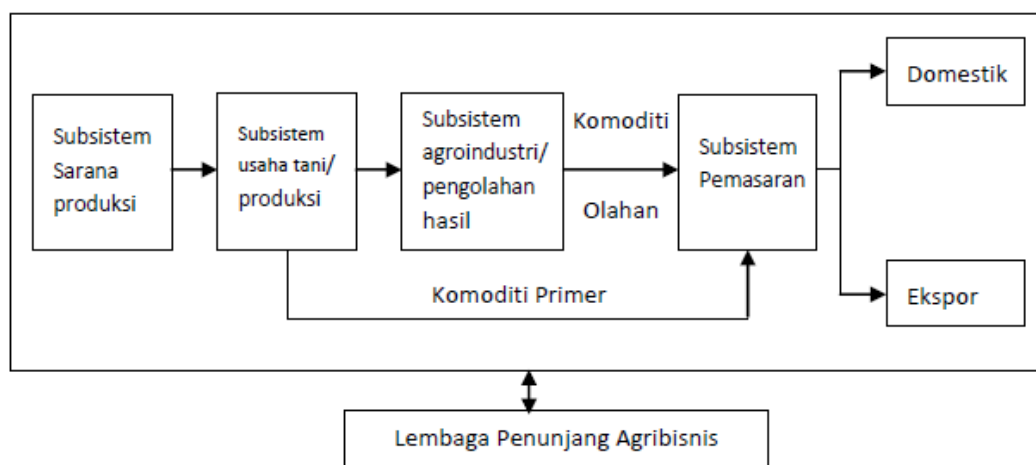
Gambar 1. Sistem Agribisnis dan Lembaga Penunjangnya

3. Agribisnis memerlukan lembaga penunjang, seperti lembaga pertanahan, pembiayaan/ keuangan, pendidikan, penelitian, dan perhubungan. Lembaga pendidikan dan pelatihan mempersiapkan para pelaku agribisnis yang profesional, sedangkan lembaga penelitian memberikan sumbangan berupa teknologi dan informasi. Lembaga-lembaga penunjang kebanyakan berada di luar sektor pertanian, sehingga sektor pertanian semakin erat terkait dengan sektor lainnya. Dengan demikian akan semakin besar sumbangan yang dapat diberikan sektor agribisnis terhadap ekonomi nasional. Di samping

memberikan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB), agribisnis juga berperan sebagai penyedia bahan kebutuhan hidup (pangan, perumahan, dan pakaian), penghasil devisa, pencipta lapangan kerja, dan sumber peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Agribisnis melibatkan pelaku dari berbagai pihak (BUMN), swasta, dan koperasi) dengan profesi sebagai penghasil produk primer, pengolah, pedagang, distributor, importir, eksportir, dan lain-lain. Kualitas sumber daya manusia di atas sangat menentukan berfungsinya subsistem-subsistem dalam sistem agribisnis dan dalam memelihara kelancaran arus komoditas dari produsen ke konsumen. Petani kecil adalah salah satu pelaku dalam agribisnis, sehingga merupakan kekeliruan besar apabila tidak memberikan perhatian dan tidak mengikutsertakan mereka, yang pada saat ini jumlahnya diperkirakan tidak kurang dari 18 juta rumah tangga.

Menurut Saragih (2001), agribisnis sebagai semua kegiatan di sektor pertanian dimulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran, sehingga produk tersebut sampai ke konsumen (Gambar 2).



Gambar 2. Mata Rantai Penunjang Agribisnis

Cakupan sistem agribisnis secara lengkap menurut Saragih (2001) adalah: (1) subsistem pengadaan sapronak (*input factors*); (2) subsistem budidaya (*production*); (3) subsistem pengolahan hasil (*processing*); (4) subsistem pemasaran (*marketing*), dan (5) subsistem kelembagaan (*supporting institution*).

Menurut Saragih (2001) yang dikutip oleh Suryanto (2004) bahwa Pembangunan agribisnis ternak ruminansia dengan menggunakan pendekatan sistem agribisnis dapat dikelompokkan menjadi 4 sistem yaitu sebagai berikut:

1. Subsistem agribisnis hulu (*upstream off-farm agribusiness*), mencakup kegiatan ekonomi industri yang menghasilkan sarana produksi seperti pembibitan ternak, usaha industri pakan, industri obat-obatan, industri insimulasi buatan dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya.
2. Subsistem agribisnis budidaya usaha tani ternak (*on-farm agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang selama ini disebut budidaya usaha tani ternak yang menggunakan sarana produksi usaha tani untuk menghasilkan produksi ternak primer (*farm-product*).
3. Subsistem agribisnis hilir (*downstream off-farm agribusiness*) yaitu kegiatan industri agro yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan dan memperdagangkan hasil olahan ternak. Dalam subsistem ini termasuk industri pemotongan ternak, industri pengolahan/ pengalengan daging, industri pengawetan kulit, industri penyamaan kulit, industri sepatu, industri pengolahan susu dan lain-lain beserta perdagangannya di dalam negeri maupun ekspor.
4. Subsistem jasa penunjang (*supporting institution*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa dalam agribisnis ternak seperti perbankan transportasi, penyuluhan, peskesnak, holding ground, kebijakan pemerintah (Ditjen Produksi Peternakan), Lembaga Pendidikan dan Penelitian dan lain-lain.

Kegiatan agribisnis ternak tersebut, di tingkat peternakan rakyat sebagian besar masih terpisah-pisah, belum terkait secara utuh dalam satu sistem. Agribisnis yang hanya pada kegiatan subsistem budidaya usaha tani ternak ruminansia yang dilakukan petani ternak, sulit diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena nilai tambah yang terbesar berada pada subsistem agribisnis hulu dan subsistem agribisnis hilir (Saragih, 2000; Suryanto, 2004).

Secara ringkas dinyatakan bahwa sistem agribisnis menekankan pada keterkaitan dan integrasi vertikal antara beberapa subsistem bisnis dalam satu sistem komoditas (Saragih, 2010). Kegiatan *agroforestry* dapat digolongkan sebagai agribisnis karena untuk mengembangkan suatu sistem *agroforestry*

ditempuh pendekatan usaha tani (*farming system*). Dengan model usaha tani ini, keputusan petani dalam memilih teknologi dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lingkungan alam dan sosial ekonomi (Departemen Kehutanan, 2014). Lingkungan alam terdiri dari keadaan tanah, topografi, kondisi-kondisi biologi (hama dan penyakit, fisiologi tanaman), curah hujan dan kelembaban.

Kondisi sosial ekonomi dapat bersifat eksternal dan internal antara lain berupa tujuan usaha tani dan sumberdaya, kendala-kendala mengenai lahan, tenaga kerja dan modal kerja serta pasar input dan output, kelembagaan, infrastruktur dan fasilitas yang kesemuanya dapat dipengaruhi oleh kebijakan nasional. Dalam pelaksanaannya, kegiatan *agroforestry* melibatkan sumberdaya alam dengan komponen-komponennya (air, tanah, hutan dan sumberdaya manusia) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti faktor-faktor iklim, sosial ekonomi, politik, budaya dan biofisik. Pelaksanaan *agroforestry* direncanakan sejak awal sebagai suatu bagian integral dari sistem bisnis *agroforestry* di daerah yang bersangkutan. Sistem bisnis *agroforestry* meliputi subsistem produksi, pemberian input, proses pasca panen dan pemasaran (Departemen Kehutanan, 2014). Disamping itu, pengembangan sistem bisnis *agroforestry* akan berjalan lancar apabila ditopang oleh sistem sarana dan prasarana dan pengembangan kelembagaan yang sesuai.

Pengembangan *agroforestry* harus merupakan bagian terintegrasi dari pembangunan regional dengan tujuan mengurangi penggundulan hutan, konservasi flora dan fauna dan plasma nutfah, mengurangi erosi tanah dan menumbuhkan peningkatan produktivitas tanah yang stabil dan berkesinambungan. Bila sasaran-sasaran ini tercapai, maka diharapkan kesejahteraan rakyat di dalam dan di sekitar hutan akan meningkat.

2.5. Kelembagaan

2.4.1. Pengertian

Menurut beberapa ahli, konsep kelembagaan adalah sebagai berikut (dalam Departemen Kehutanan, 1992):

1. Aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.
2. Aturan dan rambu-rambu sebagai panutan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain.
3. Aturan main di dalam kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. Departemen Kehutanan (1992) membedakan antara institusi dari organisasi dan mengatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya.
4. Suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat.
5. Merangkum dari berbagai pengertian tentang kelembagaan, Djogo, *et al* (2003) mengemukakan bahwa kelembagaan adalah “suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Secara sederhana, suatu hubungan sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu: (Syahyuti, 2003).

1. Komponen *person*, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
2. Komponen kepentingan yaitu orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.

3. Komponen aturan dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
4. Komponen struktur dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri.

2.4.2. Peran Kelembagaan

Kelembagaan merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam pembangunan di Indonesia. Banyak masalah-masalah pertanian dan kehutanan yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga. Sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dipayungi oleh suatu kelembagaan merupakan faktor penggerak sebagai satu kesatuan sistem dalam pembangunan pertanian dan kehutanan (Yohanes, *et al.* 2004).

Kelembagaan dalam hal ini bukan hanya menyangkut kelembagaan usaha tani, tetapi juga peranan kelembagaan-kelembagaan penunjang dalam pengembangan pertanian yang dapat mendukung pembangunan dan usaha agribisnis. Lebih jauh lagi pentingnya lembaga di pedesaan dalam pembangunan pertanian dan kehutanan diuraikan sbb. (Yohanes, *et al.* 2004)

- a. Banyak masalah-masalah pertanian hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga.
- b. Suatu organisasi atau lembaga dapat memberi kontribusi pada usaha-usaha pertanian terkait dengan penyebaran dan pengembangan teknologi. Dalam jangka panjang, kemampuan masyarakat petani untuk bekerjasama, sama pentingnya dengan perolehan pengetahuan teknis.
- c. Pada suatu masyarakat desa yang akan bersaing dengan dunia luar, mereka perlu terorganisasi. Lembaga-lembaga tingkat desa dapat menyediakan pengalaman dalam keterampilan yang harus dipelajari agar dapat mengorganisasikan diri.

Peran Kelembagaan membuat orang atau anggota masyarakat saling mendukung dan bisa memproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumberdaya alam yang didukung oleh

peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan dan menjalankan institusi.

2.4.3. Peran Kelembagaan Dalam Pengelolaan Hutan

Berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/Dir/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) maka sistem PHBM adalah pengelolaan hutan yang dapat menyelamatkan sumberdaya hutan dan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Pelaksanaan PHBM dilakukan dengan prinsip: keterbukaan, kebersamaan, keadilan, demokratis, pembelajaran bersama dan saling memahami; diselenggarakan dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan prosedur yang sederhana serta kerjasama dilakukan antar lembaga.

Masyarakat sekitar hutan yang dimaksudkan memiliki kedudukan penting dalam pengelolaan sumberdaya hutan diwujudkan dalam bentuk kelembagaan masyarakat desa hutan (LMDH). Peran masyarakat desa hutan yang diwadahi dalam LMDH terhadap pengelolaan sumber daya hutan menuju masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari adalah sebagai berikut:

1. Bersama-sama pihak pengelola hutan dan *stakeholder* bertanggungjawab terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
2. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* meningkatkan peran dan akses terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
3. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat mandiri hutan lestari
4. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* menerapkan perencanaan partisipatif.
5. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* menanggung biaya untuk melaksanakan proses pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

Selain LMDH, dalam sistem PHBM masih banyak terdapat lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan hutan atau sering disebut dengan *stakeholder* (pihak terkait), yaitu Pemerintah, LSM, Lembaga Ekonomi

Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, dll. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) sebagai berikut.

1. Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara, bersama-sama dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan berperan dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan melalui pengelolaan sumber daya hutan dengan model kemitraan.
2. LMDH mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan dan berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
3. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasi dan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Peran Pemerintah Daerah adalah mensinergikan program-program pembangunan wilayah dalam pelaksanaan PHBM. Pemerintah Daerah yang terlibat dalam PHBM meliputi: Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Masing-masing Instansi Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya melakukan pemberdayaan secara intensif terhadap masyarakat yang terlibat dalam PHBM melalui pendekatan kelompok.
4. Lembaga swadaya masyarakat, berperan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan dalam dirinya. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Lembaga ekonomi masyarakat, berperan dalam mengembangkan usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
6. Usaha swasta, berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal. Keterlibatan pihak ini dalam PHBM akan mendukung kemajuan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

7. Lembaga donor, berperan untuk memberikan dukungan dana kepada masyarakat desa hutan dalam usaha keterlibatannya di PHBM. Kerjasama dengan lembaga donor akan menjadikan masyarakat dan Perum Perhutani memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Dalam kegiatan *agroforestry*, keberhasilan pengembangannya sebagian ditentukan oleh kemampuan lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk memberikan *input* dalam jumlah yang memadai pada waktu yang tepat dan fasilitas-fasilitas untuk pasar *output* (Departemen Kehutanan, 2014).

Pengembangan *agroforestry* memerlukan dukungan berbagai macam kelembagaan. Keberhasilan upaya *agroforestry* akan meningkat apabila diintegrasikan dengan sistem pengembangan bisnis *agroforestry*. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pasar untuk *input* dan *output*. Selain itu, bisnis *agroforestry* melibatkan kelembagaan lain seperti kredit, penyuluhan, koperasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan tata guna lahan yang mantap. Kelembagaan-kelembagaan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan *agroforestry* antara lain: (1) koordinasi antar lembaga; (2) masalah pendanaan dan infrastruktur; (3) masalah kelembagaan pada tingkat lokal dan (4) distribusi keuntungan (Departemen Kehutanan, 2014).

2.4.4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian. Pemberdayaan Kelembagaan berarti meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian kelembagaan (Setiana, 2012). Dalam kerangka pembangunan di bidang *agroforestry*, upaya pemberdayaan kelembagaan dapat dilihat sbb.

1. Menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan masyarakat yang diwadahi dalam suatu lembaga di bidang *agroforestry* berkembang.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat yang diwadahi lembaga dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan di daerah.

3. Melindungi/memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat desa hutan merupakan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas masyarakat desa hutan mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki.

2.4.5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi negara Indonesia. Diperkirakan hampir lebih dari setengah penduduk Indonesia menggantungkan hidup terhadap hutan. Maka dari itu, paradigma pengelolaan hutan yang menekankan prinsip *sustainable* harus dipakai demi menjaga kelestarian fungsi hutan. Fungsi hutan itu sendiri tidak hanya fungsi ekologis, tetapi juga meliputi fungsi ekonomi, sosial dan budaya. Pengelolaan hutan terkait dengan pengusahaan hutan dan sumberdaya hutan yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan fungsi dari hutan dan faktor ketergantungan masyarakat khususnya di sekitar hutan, pengelolaan hutan harus memperhatikan berbagai aspek. Pengusahaan hutan secara sepihak akan lebih banyak menimbulkan akses yang tidak baik karena pada hakikatnya hutan adalah milik bersama. Keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan sebagai *stakeholder* yang secara langsung merasakan dampak dari pengelolaan hutan yang dilakukan. Perlu juga diperhatikan suatu mekanisme yang menjadi aturan bagi *stakeholder* dalam dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan kawasan (Awang, 2003).

Secara garis besarnya model pengelolaan yang diterapkan yaitu: pengelolaan hutan secara terpusat (*centralistic management*), pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat (*community based management*). Di samping itu, ada juga pengelolaan hutan yang diserahkan kepada swasta yang mengantongi izin pengusahaan hutan. Pengelolaan hutan oleh pihak swasta dilakukan terhadap hutan-hutan yang ditetapkan sebagai hutan produksi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pemerintah atas perhitungan biaya dan tenaga, serta pandangan penguasaan hutan yang tidak sepihak. Tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi,

kenyataannya pengelolaan hutan yang diserahkan kepada swasta justru banyak yang pada akhirnya menimbulkan masalah. Hal ini terjadi akibat pengelolaan hutan yang dilakukan lebih mengedepankan dimensi ekonomi dan mengabaikan dimensi ekologis, seperti pada kasus-kasus HPH yang ada di Indonesia. (Setiana, 2012).

Dalam perspektif pengelolaan hutan yang terjadi selama ini, hubungan hutan dan masyarakat selama ini hanya dilihat sebagai faktor ekonomi belaka, yang kemudian secara sadar "memarjinalkan" kehadiran masyarakat di dalam membangun hutan tersebut. Sebahagian masyarakat dijadikan musuh oleh pemerintah karena di stigmatisasi sebagai perusak sumberdaya alam hutan (SDAH). Selama ini masyarakat dianggap pesaing dalam pemanfaatan SDAH oleh pengusaha dan pemerintah. Bukannya masyarakat tidak bersahabat dengan hutan akan tetapi selama ini masyarakat memang dijauhkan secara politik dan ekonomi oleh pemerintah (Bambang Hendroyono, 2015).

PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) adalah istilah baru yang muncul sejak tahun 1999 di Indonesia. Istilah ini sangat dipengaruhi oleh konsep CBFM (*Community Based Forest Management*) yang dikembangkan oleh DENR (*Department of Environment and Natural Resources*). Konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan bentuk pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat yang sesuai dengan karakteristik daerah dan adat lokal yang ada, serta dilandasi oleh semangat pengelolaan kehutanan secara sosial. Melihat fenomena pergeseran dan perubahan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia cukup menarik dibandingkan dengan penanganan sumberdaya alam lainnya. Sumberdaya hutan (SDH) relatif lebih "diobok-obok" oleh publik, dan hal ini sekaligus memberikan petunjuk bahwa berbagai ragam perubahan memang diharapkan juga oleh instansi kehutanan, walaupun sering sekali perubahan itu hanya didefinisikan sendiri oleh institusi tersebut. Publik melihat SDH sering dengan perspektif masing-masing lalu kemudian cara publik melihat ini telah melahirkan ragam pengertian dan konsep dalam pembangunan kehutanan (Putri, 2012).

Menurut ahli kehutanan Westoby, *social forestry* merupakan satu pendekatan pembangunan kehutanan yang mempunyai tujuan memproduksi

manfaat hutan untuk perlindungan dan rekreasi bagi masyarakat. Sementara itu FAO memperkenalkan istilah *Community Forestry* (CF) untuk menggambarkan segala macam keadaan yang melibatkan penduduk lokal dalam kegiatan pembangunan kehutanan (Awang, 2003). Kehutanan Sosial adalah ilmu dan seni mengenai kayu-kayuan/pohon atau dan vegetasi lainnya pada semua lahan yang ada dan mengelola hutan yang ada dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menyediakan segala macam barang/bahan-bahan dan jasa-jasa untuk anggota masyarakat desa dan juga kelompok masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kehutanan sosial ini, yang paling utama dalam proyek kehutanan social terletak dalam kata "sosial" yang berarti proyek menjamin kebutuhan lokal dengan memasukkan manfaat bagi masyarakat didalam membuat rancangan kegiatan kehutanan kembali dan pembagian manfaat hasil hutan tersebut bagi masyarakat lokal. Sedangkan menurut Awang (2003) memandang kehutanan sosial harus merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan profesionalisme rimbawan yang tujuan khususnya pada peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengakomodir aspirasi mereka ke dalam pembangunan di bidang kehutanan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis Penelitian dilakukan dengan penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan menyajikan secara jelas pokok-pokok permasalahan yang diteliti yaitu memberikan uraian secara deskriptif yang menggambarkan secara jelas, faktual sistimatis dan cermat pokok-pokok persoalan yang dijumpai dan akibat-akibatnya yang kemudian mencari jalan keluarnya bagi pemecahan masalah-masalah yang dijumpai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan konstruktivistik, analisis etnografi dan studi kasus dan kajian narasi, pendekatan kualitatif mengumpulkan pemahaman partisipan penelitian dalam berbagai konteks data dan berbagai fenomena, kualitatif juga berkenaan dengan setting partisipan serta dengan interpretasi data lapangan yang diperoleh peneliti.

Pandangan filosofis penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran melalui paradigma alamiah (*naturalistik*) dan ilmiah (*scientific*). Pendekatan kualitatif merupakan paradigma adanya fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena metode ilmiah yang lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi, dan lebih sensitif terhadap segala aspek dan perubahan yang saling mempengaruhi yang bakal dihadapi oleh peneliti. Artinya bahwa perubahan desain penelitian terus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian tersebut. Langkah-langkah tersebut tidak ditentukan secara baku sejak awal penelitian, melainkan akan adanya perubahan yang ditentukan *sambil berjalan* karena situasi yang dikehendaki dalam kajian penelitian.

3.2. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kawasan Hutan Kota Alitta yang berada di lingkungan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bila, merupakan salah satu otorisasi pengelolaan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk memperoleh data dilakukan survei terhadap responden, jumlah sampel tidak perlu besar. Sampel di tentukan secara *purposive sampling* sebanyak 20 orang terdiri dari para ahli/praktisi dari berbagai lembaga/instansi terkait sebagai berikut:

- a. Lembaga perwakilan pusat di daerah yaitu Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar Sulawesi Selatan.
- b. Lembaga Teknis daerah berbentuk Badan.
 - 1) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare.
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
- c. Lembaga Teknis Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 2) KPHL Unit III Bila.
 - 3) Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
 - 5) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare
 - 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
 - 7) Dinas Perdagangan Kota Parepare
- d. Lembaga Keamanan
- e. Lembaga Desa/Kelurahan
- f. Unit Usaha/Koperasi
- g. Kelompok Tani/Gapoktan

Berdasarkan hal tersebut, subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat pengguna dan memanfaatkan hutan dalam hubungannya terkait dengan pengelolaan hutan dan begitu juga lembaga-lembaga terkait Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan KPH Bila Sidrap sebagai otorisasi pengelola hutan di kawasan Hutan Kota Alitta. Alasan peneliti memilih subyek populasi tersebut adalah karena masyarakat tersebut secara analisis kebijakan pemerintah daerah

dan dinas terkait sedang menerapkan program produktif bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Program rehabilitasi bidang pertanian agribisnis dengan memanfaatkan hutan dikembangkan dengan berbasis pertanian dan lingkungan hidup. Dari sumber data utama ini akan diperoleh informasi berkenaan dengan potensi pengembangan bidang agroforestri di kawasan Hutan Kota Alitta. Masyarakat pengguna lahan kawasan hutan dan lembaga-lembaga terkait pengelolaan hutan dianggap memiliki kepentingan yang sama dalam penelitian ini. Keberadaan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi dalam upaya memberikan data atau informasi yang dibutuhkan.

3.3. Sumber Data dan Jenis Data yang dikumpulkan

Sumber data dan jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini berdasarkan penetapan rumusan masalah, yaitu terbagi atas:

- a. Karakteristik dan pola pengelolaan agroforestri berbasis Agribisnis di kawasan Hutan Kota Alitta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: pengamatan langsung (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi.

- b. Deskripsi potensi pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

Adapun data yang dikumpulkan poin ini ada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau wawancara dengan responden melalui kuisioner, guna mendapatkan data mengenai:
 - a. Elemen dan sub elemen, serta hasil penilaian hubungan konseptual antar sub elemen guna penetapan agenda kebijakan daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Kota.
 - b. Elemen dan Sub Elemen, serta hasil penilaian hubungan kontekstual antar sub elemen yang mendukung tujuan penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya fungsi koordinasi.

- c. Elemen dan sub elemen, serta hasil penilaian hubungan kontekstual antar sub elemen yang mendukung tujuan penentuan lembaga-lembaga yang seharusnya turut berperan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan Kawasan Hutan Kota.
- d. Elemen dan sub elemen, serta hasil penilaian hubungan kontekstual antar sub elemen yang mendukung tujuan penetapan kegiatan prioritas yang dapat ditetapkan sebagai agenda kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Hutan Kota.
 - 1) Elemen untuk menentukan lembaga-lembaga yang sebaiknya berperan dalam perumusan dan implementasi kebijakan, terdiri atas sub-sub elemen:
 - a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - b) Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wil. XV Makassar
 - c) KPHL Unit III Bila.
 - d) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.
 - e) Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
 - f) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare
 - g) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
 - h) Dinas Perdagangan Kota Parepare
 - i) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare.
 - j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
 - k) Unit Usaha/Koperasi.
 - l) Kelompok Tani
 - m) Kepolisian
 - 1) Desa/Kelurahan
 - 2) Elemen untuk menentukan faktor penghambat fungsi koordinasi terdiri atas sub-sub elemen:
 - a) Kebijakan yang bersifat top down
 - b) Lemahnya komitmen aparat pemerintah
 - c) Ketidakterlibatan lembaga-lembaga dari awal perencanaan
 - d) Lemahnya pengorganisasian

- e) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
 - f) Lemahnya pembinaan/pelatihan
 - g) Lemahnya kontrol sosial
 - h) Lemahnya peran Kelompok Tani
 - i) Konflik persaingan antar lembaga
 - j) Adanya sikap sektoralisentris
- 3) Elemen untuk menentukan kegiatan prioritas yang dapat ditetapkan sebagai agenda kebijakan (strategi) potensi pengembangan agroforestry berbasis agribisnis terdiri atas sub-sub elemen:
- a) Pengefektifan koordinasi antar lembaga
 - b) Penerapan teknologi
 - c) Pengefektifan penyuluhan di lapangan
 - d) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat
 - e) Pengefektifan peran lembaga pemerintah
 - f) Penguatan fungsi kontrol
 - g) Peningkatan partisipasi masyarakat
 - h) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani
 - i) Peningkatan sumber daya modal
 - j) Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi
 - k) Jaminan harga hasil hutan
 - l) Pemberian *Reward* bagi Kelompok Tani/Petani yang mengelola Kawasan Hutan Kota.

Hasil penilaian perbandingan berpasangan dan nilai hubungan kontekstual antar elemen adalah penilaian/pendapat (*judgement*) responden tentang tingkatan prioritas elemen-elemen secara berpasangan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak pemerintah, baik dari pemerintah setempat (kelurahan), kecamatan, kota, maupun provinsi serta pemerintah pusat dalam hal ini Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar Sulawesi Selatan, sebagai subjek penelitian yang merupakan data pendukung yang sangat diperlukan dalam penelitian. Data yang dikumpul antara lain:

- a. Data yang dikumpulkan dari Pemerintah adalah data mengenai (1) keadaan umum lokasi penelitian (2) kondisi masyarakat yang mengusahakan Kawasan Hutan Kota Alitta (3) Kondisi umum Hutan Kota di Kota Parepare, (4) Peta Kawasan Hutan Kota Alitta, (5) Peraturan/kebijakan perintah yang mendukung tentang pengelolaan Kawasan Hutan Kota, (6) Peran aktif stakeholder yang terlibat kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Kota (7) Sarana dan Prasarana yang telah ada. (8) serta tingkat keberhasilan dari kegiatan-kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Kota yang diukur dari hasil Evaluasi kegiatan.
- b. Data yang dikumpulkan dari kelembagaan, observasi dan studi dokumentasi yang ada adalah data mengenai (1) Jenis-jenis tanaman berkayu yang cocok/sesuai untuk dikembangkan di daerah tersebut (2) Jenis yang lebih suka ditanam oleh petani dan alasan-alasannya. (3) Eksistensi kelembagaan Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan jangka panjang yang ada di masyarakat sekitar hutan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan/pengumpulan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kuesioner

Kuesioner disusun dengan menggunakan semua elemen sebagai kisi-kisi dan disusun dalam bentuk pertanyaan dengan membandingkan elemen yang satu terhadap/dengan yang lainnya secara berpasangan. Kuesioner yang dimaksudkan untuk menjaring data yang akan dianalisis dengan *Interpretative Structural Modeling* (ISM), menggunakan penilaian perbandingan hubungan kontekstual, dengan menggunakan simbol-simbol V, A, X dan O.

2. Penetapan Sampel dan Responden

Untuk memperoleh data dilakukan survei terhadap responden, jumlah sampel tidak perlu besar. Sampel di tentukan secara *purposive sampling* sebanyak 20 orang terdiri dari para ahli/praktisi dari berbagai lembaga/instansi terkait sebagai berikut:

- a. Lembaga perwakilan pusat di daerah yaitu Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar Sulawesi Selatan.
- b. Lembaga Teknis daerah berbentuk Badan.
 - 1) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare.
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
- c. Lembaga Teknis Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 2) KPHL Unit III Bila.
 - 3) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.
- d. Lembaga Keamanan
- e. Lembaga Desa/Kelurahan
- f. Unit Usaha/Koperasi
- g. Kelompok Tani/Gapoktan

3. Melakukan Wawancara

Agar diperoleh data yang objektif, pelaksanaan wawancara dilakukan yang didahului dengan sosialisasi tentang tujuan penelitian. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pentingnya dan keterkaitan elemen-elemen yang telah ditetapkan dengan tujuan penelitian.

3.5. Analisis Data

Interpretative Structural Modelling (ISM) adalah alat analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. ISM adalah alat analisis yang mampu mengelompokkan peubah (elemen) ke dalam empat sektor menurut tingkat prioritas dan kepentingannya terhadap program yang dikaji. Selain itu dapat menunjukkan saling keterkaitan peubah menurut sektor masing-masing.

Interpretative Structural Mudelling (ISM) digunakan sebagai alat analisis data guna memperoleh gambaran formulasi potensi pengembangan agroforestri berbasis agribisnis. Tahapan analisis ISM dilakukan melalui prosedur seperti Gambar 4.

1. Menyusun *Structural Self-Interaction Matrix* (SSIM), yaitu masukan (penilaian) dari responden terhadap sub-sub elemen di atas, sebagai hasil pertimbangan hubungan kontekstual, dengan menggunakan simbol-simbol

V, A, X dan O yaitu :

V adalah $e_{ij} = 1$ dan $e_{ji} = 0$

A adalah $e_{ij} = 0$ dan $e_{ji} = 1$

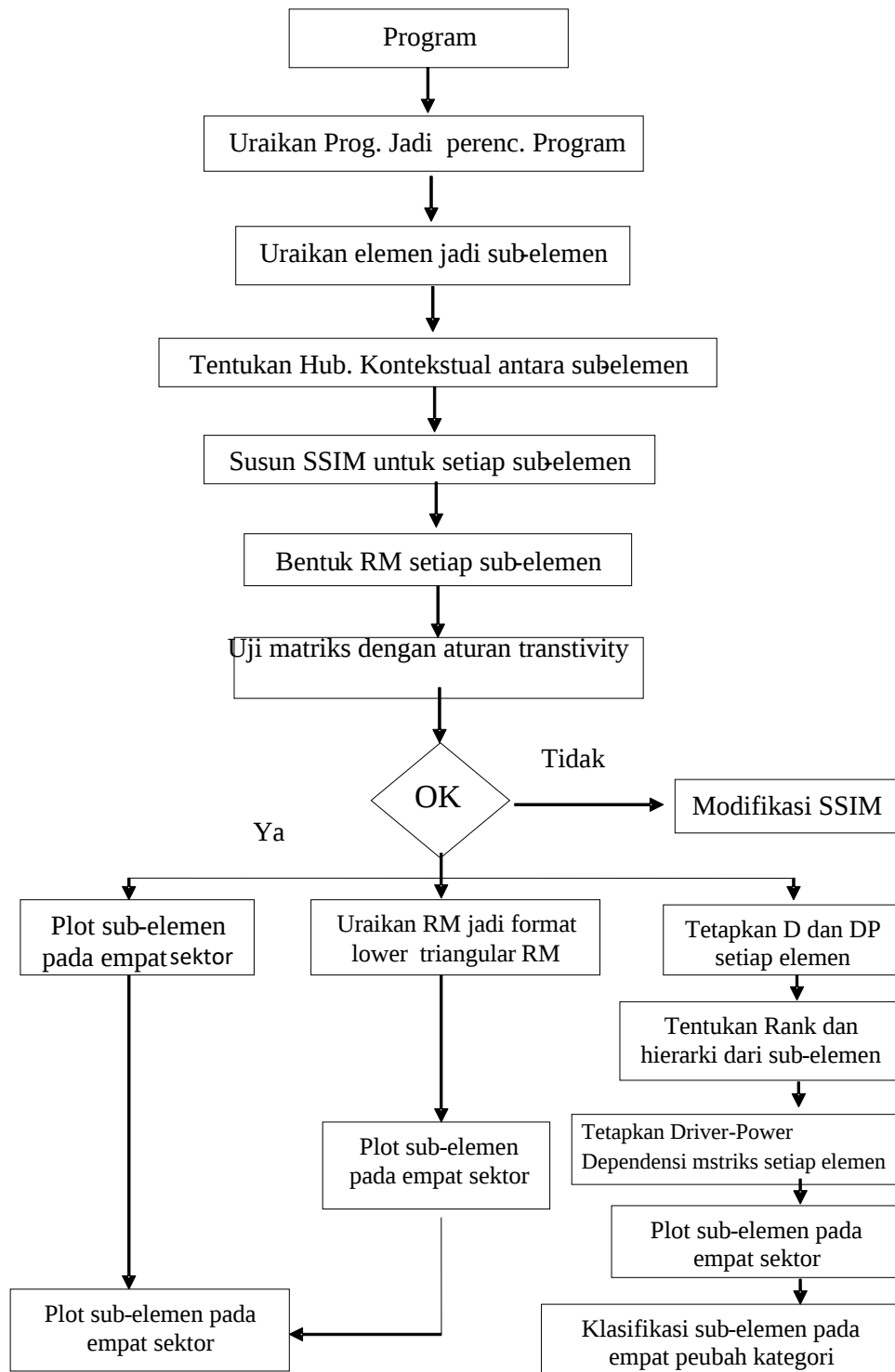
X adalah $e_{ij} = 1$ dan $e_{ji} = 0$

O adalah $e_{ij} = 0$ dan $e_{ji} = 0$

Dalam hal mana angka 1 dan 0 menunjukkan:

1 = ada hubungan kontekstual antar elemen

0 = tidak ada hubungan kontekstual antar elemen.



Gambar 3.1. Diagram Alir Teknik ISM (Eriyatno. 1999)

2. Menyusun tabel *Reachability Matrix*, dengan mengganti simbol-simbol V, A, X, O dengan angka 1 dan 0
3. Menyusun model struktural (tingkat level) setiap elemen.
4. Menyusun *Matrix Driver Power – Dependent* (DP_D) yang terdiri dari empat sektor seperti pada Gambar 3.2.

DP	12	IV											
	11												
	10										III		
	9												
	8												
	7												
	6												
	5												
	4												
	3		I								II		
	2												
	1												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:

DP = *Driver Power*

D = *Dependent*

I = *Autonomous*

II = *Dependent*

III = *Linkage*

IV = *Independent*

Gambar 3.2. *Matrix Driver Power – Dependent* (Eriyatno 1999)

Dari keempat sektor yang dimaksudkan dapat ditetapkan kebijakan yang perlu diterapkan berdasarkan bobot *Driver Power–Dependent* yang diperoleh dalam analisis.

- Sektor I : *Autonomous*, peubah disektor ini umumnya tidak berkaitan dengan sistem, dan atau hubungannya sangat kecil, meskipun hubungan bisa saja kuat.
- Sektor II : *Dependent*, umumnya peubah yang ada di sektor ini adalah peubah tidak bebas, artinya semua peubah yang ada di dalamnya merupakan akibat dari tindakan terhadap peubah lainnya.
- Sektor III : *Linkage*, peubah-peubah yang masuk di sektor ini sangat penting dan harus dikaji secara hati-hati, sebab hubungan dengan peubah lainnya tidak stabil. Setiap tindakan pada peubah tersebut akan memberikan dampak terhadap peubah lainnya, dan umpan balik peubahnya bisa memperbesar dan atau menimbulkan dampak yang bam. Dengan kata lain, setiap tindakan pada tujuan-tujuan (peubah) tersebut akan menghasilkan sukses, sebaliknya lemahnya perhatian tersebut akan menyebabkan kegagalan program.
- Sektor IV : *Independent*, peubah ini merupakan peubah bebas, artinya merupakan kekuatan penggerak yang besar (*driver power*), tetapi hanya punya sedikit ketergantungan terhadap yang lain.

3.6. Rekomendasi yang Akan Dihasilkan

Berdasarkan hasil perhitungan bobot elemen sebagaimana dikemukakan di atas, hasil penelitian ini akan merenkomendasikan sebagai berikut:

1. Deskripsi atau gambaran umum sehubungan dengan tujuan penelitian pertama (Karakteristik Kawasan Hutan Kota Alitta), sebagai bagian dari data utama terkait potensi pengembangan bidang agroforestry berbasis agribisnis di kawasan hutan kota aliita kota parepare.
2. Analisis ISM sehubungan dengan tujuan penelitian kedua (potensi dan pola pengembangan bidang agroforestry berbasis agribisnis di Kawasan hutan kota alitta), maka direkomendasikan bahwa elemen-elemen yang berada pada sektor *linkage* dan *independent*, masing-masing merupakan elemen prioritas pertama dan kedua sebagai bagian dari proses mengembangkan dan

mengelola bidang agroforestry berbasis agribisnis di Kawasan hutan kota alitta.

3.7. Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Januari sampai bulan Maret 2023. Dengan lokasi penelitian pada Kawasan Hutan Kota Alitta.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan data dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan melalui pengamatan lapangan (observasi), kuisioner, wawancara dan dokumentasi, yakni mempelajari data laporan beserta arsip yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penulis juga akan memberi gambaran umum tentang lokasi tempat penulis meneliti. Untuk lebih memudahkan penulis dalam menyajikan data secara konkrit dan jelas, maka penulis akan mencoba menyederhanakan data yang penulis dapatkan dengan memberi gambaran secara umum lokasi penelitian sampai kepada proses wawancara, antara lain sebagai berikut:

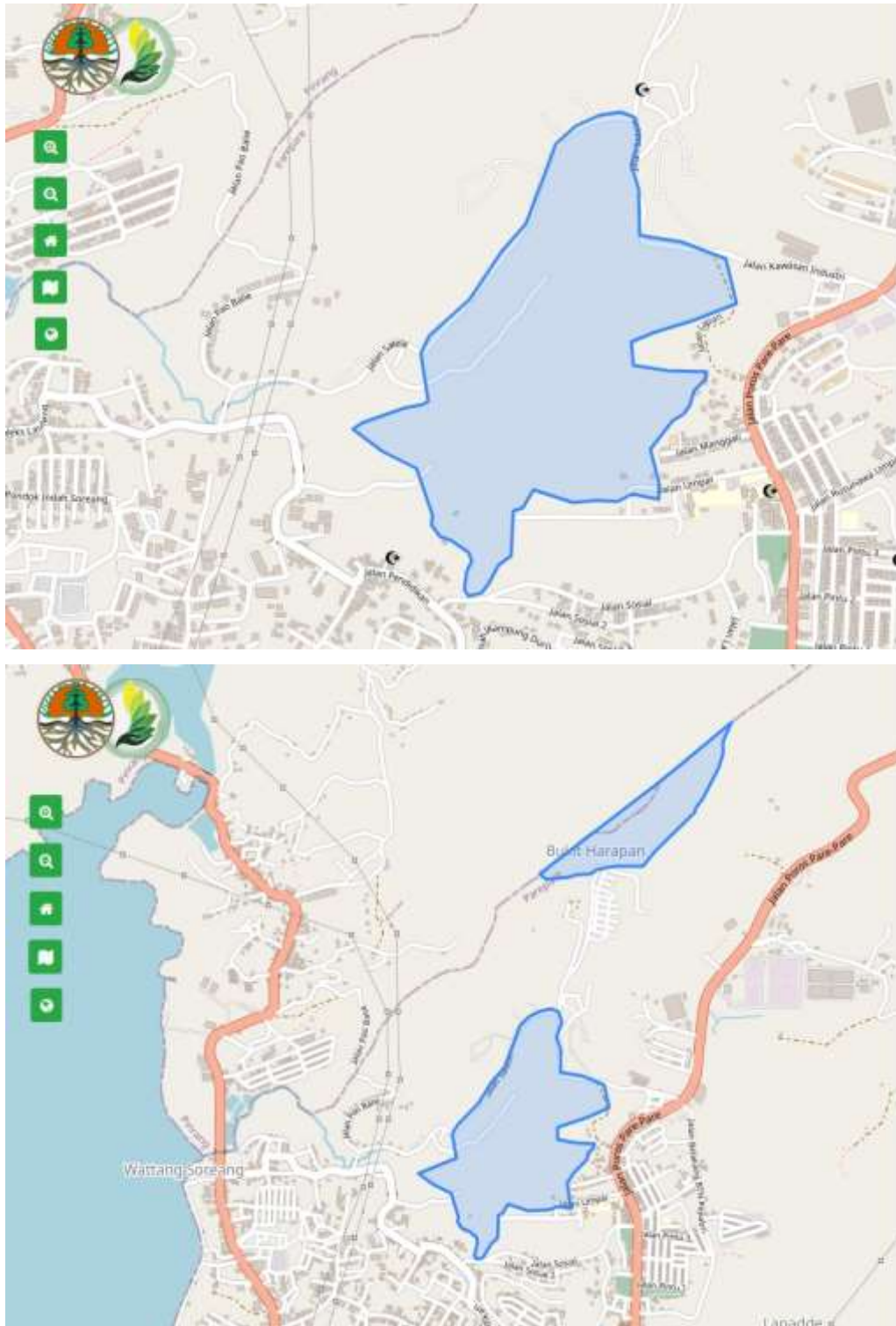
4.1. Karakteristik dan Gambaran Umum Kawasan Hutan Kota Alitta

Penelitian ini berlokasi di Hutan Kota Alitta, secara administrasi terletak pada Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil *minute off meeting* dengan Lurah, Tokoh Masyarakat, dan KPHL Unit III Bila, berdasarkan wawancara dan observasi lapangan dengan beberapa penyesuaian hingga saat ini Hutan Alitta memiliki luas 46,13 ha.

Secara geografis areal hutan tersebut berada pada 119° 38' 51,420" E – 119° 38' 52,018"E dan 03° 58' 49,153" S – 03° 58' 54,493". Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumentasi penelitian sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 665/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017, secara administratif letak geografis Hutan Alitta adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Pinrang serta daerah pesisir pantai

Gambar 4.1 dan 4.2. Peta Kawasan Hutan Alitta



Sumber: Data UPT KPH Bila Unit III, 2022

4.1.1. Topografi

Hutan Alitta berada pada ketinggian 26 – 48 mdpl. Wilayah Hutan Alitta memiliki kelas kemiringan lereng bervariasi antara datar (0-8%) sampai dengan sangat curam > 40 %. Wilayah Hutan Kota Alitta hampir didominasi kelas kemiringan lereng yang curam seluas 19,44 Ha (42,14%) sedangkan kelas kemiringan lereng paling kecil yaitu agak curam dengan luas hanya 6,03 Ha (13,07%). Tingkat kelerengan wilayah Hutan Alitta selengkapnya disajikan pada Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1. Luas dan Proporsi Kelas Kemiringan Lereng Hutan Alitta

No	Kelas Kemiringan Lereng	Kelas Lereng	Luas (Ha)	(%)
1	Datar	0 – 8	6,54	14,17
2	Landai	8 – 15	9,03	19,57
3	Agak Curam	15 – 25	6,03	13,07
4	Curam	25 – 40	19,44	42,14
5	Sangat Curam	> 40	5,09	11,03
Jumlah			46,13	100

Sumber: Peta Kelas Kemiringan Lereng KPHL Unit III Bila Tahun 2018 dari BPKH Wilayah VII

Gambar 4.3. Peta Topografi Kawasan Hutan Alitta



Sumber: Google Earth, 2022

4.1.2. Iklim

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman Data iklim Hutan Alitta disadur berdasarkan data yang diambil dari keseluruhan wilayah KPHL Unit III Bila, dimana secara umum kondisi iklim Kota Parepare sebagian besar bertipe C (iklim hujan sedang). Untuk di sebagian Kecamatan Soreang dan Kecamatan Bacukiki termasuk tipe iklim B (iklim hujan kering). Tipe iklim C pada wilayah KPH Ajatappareng berkisar 58,64% dari luas wilayah LPH Ajatappareng dan tipe iklim B hanya sekitar 11,21%.

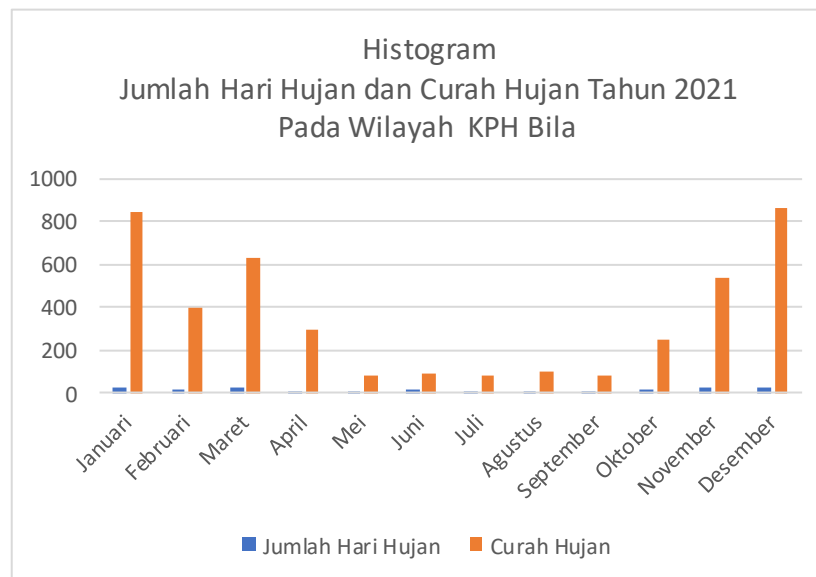
Jumlah hari hujan dan curah hujan bervariasi dalam setahun. Jumlah curah hujan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Parepare untuk tahun 2021 sekitar 276,33 mm/tahun.

Jumlah hari hujan dan curah hujan tahun 2021 perbulan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Tahun 2021 Pada Wilayah KPHL Unit III Bila

No	Bulan	Jumlah hari hujan	Curah Hujan (mm)
1	Januari	30	839,9
2	Februari	20	397,0
3	Maret	23	626,3
4	April	11	294,0
5	Mei	11	78,1
6	Juni	14	87,0
7	Juli	9	77,3
8	Agustus	8	104,2
9	September	11	82,5
10	Oktober	17	245,4
11	November	26	542,0
12	Desember	28	860,3
	JUMLAH	208	4.234,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2021



Gambar 4.4. Histogram Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Wilayah KPHL Unit III Bila

4.1.3. Jenis Tanah

Jenis tanah pada areal ini adalah jenis Dystropepts (BPS Kota Parepare, 2022). Jenis tanah ini, umumnya berpenampang sedang sampai dalam, tekstur umumnya halus dan drainase baik. Dibeberapa tempat jenis tanah ini bisa dikembangkan untuk pertanian lahan kering baik semusim maupun tanaman tahunan dengan mengupayakan peningkatan kesuburan tanah.

Hasil analisis laboratorium (Mukrimin, 2013) menunjukkan bahwa sifat-sifat tanah di lokasi penelitian yaitu memiliki tekstur liat. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kandungan tanah sampel yaitu kandungan liat 56 %, debu 22% dan pasir (22%).

4.1.4. Jenis Tanaman yang tumbuh di Kawasan Hutan Alitta

Berdasarkan hasil inventarisasi pada saat observasi di lokasi penelitian, kami menemukan beberapa jenis tanaman kayu seperti kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Daftar inventarisasi jeni tanaman yang tumbuh di kawasan hutan kota alitta

No	Nama Tanaman	Gambar (Hasil Dokumentasi Pengamatan Lapangan)
1.	Jati (<i>Tectona grandis</i>)	
2.	Mahoni (<i>Swietenia spp</i>)	
3.	Bitti (<i>Vitex cofassus</i>)	
4.	Kayu Jawa (<i>Lannea Grandis</i>)	
5.	Kemiri (<i>Aleurites moluccanus</i>)	

6.	Cenrana/Angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>)	
7.	Pohon aren (<i>Arena Pinnata</i>)	
8.	Kapuk (<i>Ceiba Pentrandia</i>)	
9.	Lamtoro (<i>Leucanea glauca</i>)	
10.	Mangga (<i>Mangnifera indica</i>)	

11.	Jambu Mete (<i>Anacardium occidentale</i>)	
12.	Jambu Batu (<i>Psidium guajava</i>)	
13.	Trembessi (<i>Samanea saman</i>)	
14.	Pohon Kelapa (<i>Coconus Nucifera</i>)	
15.	Jagung (<i>Zea mays</i>)	

4.2. Deskripsi Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

4.2.1. Lembaga-lembaga Pemeran dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

Hasil *ISM* menunjukkan bahwa dari 12 lembaga, ada 7 diantaranya sebagai lembaga yang berperan Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Diantara 7 lembaga yang dimaksudkan adalah Lembaga Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lembaga Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga Desa/Kelurahan, Lembaga Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah XV, Lembaga Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan Kelompok Tani adalah merupakan faktor kunci ($DP=12$). Besarnya hubungan setiap lembaga dapat diidentifikasi melalui besarnya frekuensi daya penggerak (*driver power*) dan ketergantungannya (*dependence*) pada Tabel 4.2 berikut;

Tabel 4.2. *Reachability Matrix* Lembaga-lembaga pemeran dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

		Sub elemen j												DP	R
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
I	A	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	6
	B	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	8	4
	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
	D	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	9	3
	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
	F	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	7
	G	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4	6
	H	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	6
	I	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	8	4
	J	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
	K	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	5	5
	L	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10	2
	DP	11	8	3	6	3	9	11	10	8	4	10	8		
	R	1	4	7	5	7	3	1	2	4	6	2	4		

Keterangan:

A = Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

B = Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Wil. XV

C = Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Parepare.
 D = Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare
 E = Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare
 F = Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Parepare
 G = Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare
 H = Unit Usaha/Koperasi
 I = Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
 J = Kelompok Tani
 K = Kepolisian
 L = Kelurahan

1. Lembaga-lembaga di posisi *independent*

Hasil analisis *ISM* menunjukkan bahwa pada posisi *independent*, terdapat empat lembaga seperti lembaga Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Dinas Lingkungan Hidup, Kelompok Tani dan Desa/Kelurahan. Lembaga ini merupakan empat lembaga yang sangat berhubungan dengan Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, akan tetapi ketergantungan dengan lembaga lain lemah. Tiga lembaga diantaranya merupakan lembaga yang sangat kuat hubungannya yaitu lembaga Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kelompok Tani dan Desa/Kelurahan.

Lembaga Kelompok Tani merupakan lembaga yang sangat berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling menentukan untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta karena lembaga tersebut mempunyai peran dalam pengelolaan dan atau mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mewujudkan *hutan lestari masyarakat sejahtera*.

Untuk melihat posisi pentingnya peran setiap lembaga untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, dilakukan pemisahan ke 12 lembaga melalui *matriks driver power-dependence* seperti tersaji pada Tabel 4.4 dan Gambar 4.5.

Tabel 4.4. Posisi dan Perbandingan Bobot *DP-D* Lembaga-lembaga pemeran Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

Posisi	Sub elemen	Bobot	
		<i>DP</i>	<i>D</i>
1. <i>Independent</i> (Daya dorong terhadap program kuat, sebaliknya ketergantungan terhadap sub elemen lainnya lemah)	1. Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare	0,75	0,42
	2. Dinas LH Kota Parepare	0,67	0,33
	3. Kelompok Tani	1,00	0,50
	4. Desa/Kelurahan	0,83	0,33
	Rata-rata	0,81	0,39
2. <i>Linkage</i> (Daya dorong terhadap program kuat, dan ketergantungan terhadap sub elemen lainnya juga kuat)	1. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Wil. XV	0,67	0,67
	2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Parepare	1,00	0,58
	3. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare.	1,00	0,58
	Rata-rata	0,89	0,61
3. <i>Dependent</i> (Daya dorong terhadap program lemah, dan sebaliknya ketergantungan terhadap sub elemen lainnya kuat)	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi	0,42	0,83
	2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,25	0,75
	3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare	0,33	0,92
	4. Kepolisian	0,42	0,83
	5. Unit usaha/koperasi	0,42	0,83
	Rata-rata	0,36	0,83
4. <i>Autonomous</i> (Daya dorong terhadap program lemah, dan ketergantungan terhadap sub elemen lainnya juga lemah)	-	-	-
	Rata-rata	-	-

12						J	C/E					
11												
10				L								
9			Independent		D				Linkage			
8				I				B				
7												
6												
5										K		
4										H	AG	
3									F			
2												
1												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:

A = Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

B = Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Wil. XV

C = Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Parepare.

D = Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare

E = Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare

F = Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Parepare

G = Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare

H = Unit Usaha/Koperasi

I = Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

J = Kelompok Tani

K = Kepolisian

L = Desa/Kelurahan

Gambar 4.5. Posisi *Driver Power-Dependent* lembaga-lembaga pemeran dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Kelompok Tani adalah Tiga lembaga yang merupakan lembaga yang paling menentukan untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) merupakan lembaga yang di dalamnya para penyuluh lapangan yang mempunyai tugas dan fungsi; 1) mengadopsi ilmu yang diperoleh ke petani, 2) sebagai motivator dan fasilitator.

Kelompok tani merupakan lembaga yang sangat berhubungan dengan pengelolaan Kawasan hutan, karena lembaga ini yang merencanakan, mengelola sekaligus menikmati hasil dari program Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

Besarnya peran (*driver power*) mengindikasikan bahwa peran positif keempat lembaga ini sangat penting dan kecilnya kebergantungan (*dependent*) menunjukkan peluang adanya dampak negatif yang akan ditimbulkan akibat pengaruh lembaga lain kecil. Keempat lembaga di sektor ini tiga lembaga merupakan lembaga pemerintah dan satu lembaga merupakan lembaga swasta.

Peran lembaga-lembaga di sektor *independent* selama ini terutama lembaga pemerintah seharusnya mampu melibatkan dan menggerakkan masyarakat dan lembaga lain secara optimal sehingga lembaga seperti Gapoktan/kelompok tani, mampu berperan secara optimal. Namun fungsi tersebut belum sepenuhnya dapat diaktualisasikan oleh lembaga ini.

Dinas Pertanian dan perkebunan sebagai lembaga pemegang kewenangan di posisi *independent* dengan bobot *DP* (0,75), yaitu sebagai lembaga pemeran kunci dalam merumuskan dan mengoptimalkan kebijakan Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai lembaga pemegang kewenangan pusat dibidang pertanian dan perkebunan di daerah ini adalah lembaga yang perannya penting sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain 1) Melaksanakan urusan dibidang pertanian dan perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota Parepare, 2) Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian dan perkebunan, 3) Pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah

daerah dibidang pertanian dan perkebunan serta 4) Pembina dan pelaksana tugas dibidang pertanian dan perkebunan.

Peran Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membangun pertanian dan perkebunan berwawasan agribisnis yang dalam menjabarkan kegiatannya didukung oleh lembaga lain seperti BP3K dan PPL yang dilakukan melalui pemberdayaan, bimbingan dan penyuluhan guna mewujudkan Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

Gapoktan/kelompok tani adalah merupakan lembaga yang memiliki daya perannya kuat untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta dengan bobot $DP = 1$. Angka ini menunjukkan bahwa lembaga ini berperan dalam usaha Pengelolaan HTR. Peran gapoktan/Kelompok tani untuk berusaha mencapai skala usahatani optimal dan koordinasi dalam menghadapi mitra usaha dan peningkatan gerakan bersama. Sebagaimana fungsi gapoktan/kelompok tani sebagai berikut 1) Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga), 2) Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya, 3) Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/pinjaman kepada petani yang memerlukan, 4) Melakukan proses pengolahan produksi para anggota 5) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir.

Gapoktan/kelompok tani dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai unit usahatani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro serta unit jasa penunjang lainnya sehingga menjadi lembaga petani yang kuat dan mandiri.

2. *Lembaga-lembaga di Posisi linkage*

Hasil analisis *ISM* menunjukkan bahwa terdapat tiga lembaga yang berperan untuk Pengelolaan HTR. Ketiga lembaga tersebut tersaji menurut posisi *driver power-dependen* masing-masing adalah: 1) Balai Pemantauan Pemanfaatan

Hasil Hutan Wilayah XV Makassar, 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Parepare dan 3) BLH Daerah Kota Parepare.

Ketiga lembaga tersebut berdasarkan analisis *ISM* berada di posisi *linkage* seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1 yaitu sebagai lembaga yang perannya untuk Optimalisasi Pengelolaan HTR sangat kuat dan keterkaitannya dengan lembaga lain juga besar. Sebagai lembaga yang perannya besar memiliki rata-rata bobot $DP = 0,89$ dan $D = 0,61$ (Tabel 4.3). Besarnya bobot DP merupakan indikator bahwa ketiga lembaga di posisi ini memiliki peran yang sangat penting untuk pengelolaan kawasan hutan. Demikian pula besarnya bobot D menunjukkan besarnya ketergantungan terhadap lembaga lain untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

Dinas DLHK dan BLH adalah merupakan lembaga penting yang memiliki bobot $DP = 1,00$ merupakan bobot tertinggi di sektor *linkage*. Peran lembaga ini untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta kuat pengaruhnya akan tetapi keterkaitan dengan lembaga lain khususnya koordinasi dengan lembaga lainnya kecil. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi langsung dengan pengelola Kawasan hutan, seharusnya menjadi fasilitator yang baik terhadap kelompok pengelola Kawasan hutan, sehingga lokasi tersebut dapat menghasilkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana.

Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil hutan Wilayah XV Makassar adalah merupakan lembaga yang memiliki $DP = 0,67$. Pentingnya peran lembaga ini untuk Pengelolaan HTR terlihat berdasarkan fungsi dan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi lestari. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BP2HP memiliki fungsi: (1) Penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok Balai, (2) Penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina usaha kehutanan, (3) Penyiapan tenaga teknis bidang bina usaha kehutanan dan penyiapan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional, (4) Pemberian perpanjangan atau

usulan pencabutan ijin operasional teknis fungsional, (5) Penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina usaha kehutanan, (6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, rencana pemenuhan bahan baku industri, industri primer dan dokumen peredaran hasil hutan, (7) Pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari, dan (8) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga ini seharusnya menjadi fasilitator yang selalu berkoordinasi dengan lembaga lain dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, namun kondisi tersebut tidaklah mudah mengingat lemahnya koordinasi antar lembaga.

3. *Lembaga-lembaga di posisi dependent*

Hasil analisis *ISM* menunjukkan bahwa ada 5 lembaga yang daya perannya untuk Potensi Pengembangan Agribisnis berbasis agroforestri di Kawasan Hutan Alitta Kota Parepare yaitu 1) Dinas Kehutanan Provinsi, 2) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 4) Kepolisian, dan 5) Unit Usaha/koperasi, Kelima lembaga ini memiliki bobot rata-rata $DP = 0,36$ dan $D = 0,83$.

Lembaga Dinas Kehutanan Provinsi sebagai lembaga yang cukup berperan untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, karena lembaga ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat tergantung kebijakan dari pusat, sehingga kegiatan-kegiatannya bersifat *top down*, hal ini sangatlah berbeda dengan Dinas Kehutanan di Kota Parepare karena otonomi daerah yang menyebabkan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di daerah diberikan sepenuhnya kepada kabupaten/kota dalam pengelolaannya.

Lembaga Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepolisian dan Unit usaha/koperasi sebagai lembaga yang perannya lemah tetapi tetap sebagai lembaga yang mempunyai peran untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

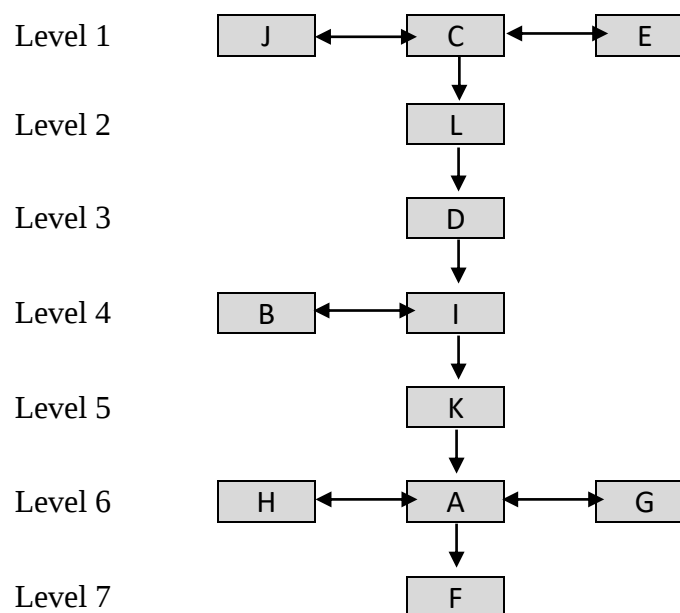
Unit Usaha/koperasi berperan sebagai tempat simpan pinjam dan membina atau melatih petani tetapi terkadang lembaga ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kepengurusan yang tidak berjalan dengan baik, padahal lembaga ini dapat berperan cukup besar untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, terutama dalam mengakses modal dan peningkatan pengetahuan petani melalui kredit di koperasi dan dengan adanya pembinaan/pelatihan dari berbagai unsur sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani terkhusus petani pengguna dan pengelola Kawasan hutan.

Kecilnya *DP* merupakan indikasi lemahnya peran untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, sedangkan *D* menunjukkan bahwa kebergantungannya pada lembaga lain besar. Lemahnya daya peran lembaga-lembaga tersebut dapat dibangkitkan melalui besarnya kebergantungannya terhadap lembaga lainnya. Artinya peran lembaga-lembaga tersebut untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta ditimbulkan melalui pengaruh lembaga lain.

Untuk membangkitkan peran lembaga-lembaga ini, tidak dibutuhkan program khusus melainkan lewat pengaruh lembaga lainnya. Selama ini lembaga-lembaga yang ada tidak saling memotivasi, sebagai dampak lemahnya komitmen kerjasama aparat, keterlibatan lembaga-lembaga dari awal, tumbunya sikap sentralistik dan lemahnya fungsi koordinasi. Karena itu membangkitkan peran kelima lembaga di sektor *dependent*, dapat diantisipasi melalui penumbuhkembangan koordinasi antar sektor.

4. Model Struktural Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

Untuk melihat keberkaitan lembaga-lembaga untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, disusun model struktural peran setiap lembaga seperti tersaji pada Gambar berikut:



Keterangan:

A = Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
 B = Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Wil. XV
 C = Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Parepare.
 D = Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare
 E = Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare
 F = Dinas Peternakan Kota Parepare
 G = Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare
 H = Unit Usaha/Koperasi
 I = Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
 J = Kelompok Tani
 K = Kepolisian
 L = Desa/Kelurahan

Gambar 4.6. Model struktur lembaga-lembaga pemeran dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

Gambar 4.6. menyajikan urutan posisi peran lembaga sehingga dapat ditunjukkan urutan kepentingan peran masing-masing lembaga dalam perencanaan Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, yaitu 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Parepare, 2) BLHD, 3) Kelompok tani pada level kunci yakni sebagai lembaga yang paling besar perannya untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta dan berada

diposisi *independent* dan *linkage* Selanjutnya menyusul 4) Desa/Kelurahan di Level 2, 5) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan di Level 3, 6) BP2HP WIL XV Makassar, 7) Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare di Level 4, 8) Kepolisian di Level 5, 9) Unit usaha/koperasi 10) Dinas Kehutanan Provinsi 11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Level 6, 12) Dinas Peternakan Kota Parepare di Level 7.

Lembaga-lembaga di posisi *dependent* merupakan lembaga yang tidak berperan dalam perencanaan kebijakan untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Perannya terhadap Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta sangat lemah, namun memiliki kebergantungan yang besar terhadap lembaga lainnya. Artinya peran kelima lembaga di sektor ini dapat dikembangkan melalui pengaruh lembaga lainnya.

Berdasarkan Gambar 4.5, Tabel 4.4, dan uraian Gambar 4.6, dapat disimpulkan bahwa Lembaga-lembaga yang berperan dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, yaitu empat lembaga di posisi *independent* dan tiga lembaga di posisi *linkage*. Ketiga lembaga di posisi *linkage* di samping berperan sangat penting dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, juga sangat rentan terhadap pengaruh lembaga lainnya sehingga peran ketiga lembaga ini sangat menentukan keberhasilan Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Lembaga-lembaga di posisi *independent* sebagai pemeran kunci optimalisasi Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu 1) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Parepare, 2) Kantor Lingkungan Hidup Kota Parepare, 3) Kelompok Tani 4) Desa/Kelurahan.

4.2.2. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Lemahnya Fungsi Koordinasi untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

Hasil *ISM* menunjukkan bahwa dari 10 faktor, ada 7 diantaranya sebagai faktor-faktor penyebab lemahnya fungsi koordinasi untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Diantara 7 faktor yang dimaksudkan, faktor lemahnya pengorganisasian adalah merupakan faktor kunci ($DP = 10$). Besarnya hubungan setiap faktor dapat diidentifikasi melalui besarnya frekuensi daya penggerak (*driver power*) dan ketergantungannya (*dependence*) seperti pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.5. *Reachability Matrix* Faktor-faktor penghambat fungsi koordinasi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

		J											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	DP	R
I	A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
	B	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	6	5
	C	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8	3
	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	2
	F	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	2
	G	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	4	6
	H	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7
	I	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7	4
	J	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	7	4
	D	8	8	6	4	4	4	7	9	7	5		
	R												

Keterangan:

A = Kebijakan yang bersifat top down

B = Lemahnya komitmen aparat pemerintah

C = Ketidakterlibatan lembaga dalam perencanaan awal

D = Lemahnya pengorganisasian

E = Rendahnya kualitas SDM

F = Lemahnya pembinaan/pelatihan

G = Lemahnya control sosial

H = Lemahnya peran kelompok tani

I = Konflik/persaingan antar lembaga

J = Adanya sikap sektoralisentris

Faktor lemahnya pengorganisasian menjadi faktor kunci penyebab lemahnya fungsi koordinasi untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Selain itu kurangnya pelatihan dan bimbingan bagi masyarakat dan aparat desa sehingga pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan kawasan hutan masih kurang, masih ada aparat kelurahan yang belum membudayakan membaca yang dapat menambah pengetahuan dan kesejahteraan aparat yang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah.

Untuk melihat posisi penyebab lemahnya masing-masing faktor, dilakukan pemisahan ke 10 faktor melalui *matriks driver power-dependence* seperti tersaji pada Tabel 4.6. dan Gambar 4.7.

Tabel 4.6. *Reachability Matrix* Faktor-faktor penyebab lemahnya fungsi koordinasi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

Posisi	Sub elemen	Bobot	
		<i>DP</i>	<i>P</i>
1. <i>Independent</i> (Dayadorong terhadap program kuat, sebaliknya ketergantungan terhadap sub elemen lainnya lemah)	1. Lemahnya pengorganisasian	1,00	0,40
	2. Rendahnya kualitas SDM	0,90	0,40
	3. Lemahnya pembinaan/pelatihan	0,90	0,40
	4. Adanya sikap sektoralisentris	0,70	0,50
	Rata-rata	0,87	0,42
2. <i>Linkage</i> (Daya dorong terhadap program kuat, dan ketergantungan terhadap sub elemen lainnya juga kuat)	1. Lemahnya komitmen aparat pemerintah	0,60	0,80
	2. Ketidakterlibatan lembaga dalam perencanaan awal	0,80	0,60
	3. Konflik/persaingan antar lembaga	0,70	0,70
	Rata-rata	0,70	0,70
3. <i>Dependent</i> (Daya dorong terhadap program lemah, dan sebaliknya ketergantungan terhadap sub elemen lainnya kuat)	1. Kebijakan yang bersifat top down	0,10	0,80
	2. Lemahnya kontrol sosial	0,40	0,70
	3. Lemahnya peran kelompok tani	0,10	0,90
	Rata-rata	0,20	0,80

4. <i>Autonomous</i> (Dayadorong terhadap program lemah, dan ketergantungan ter- hadap sub elemen ainnya juga lemah)	-	-	-
	Rata-rata	-	-

10				D						
9				EF						
8		<i>Independent</i>				C		<i>Linkage</i>		
7					J		I			
6								B		
5										
4							G			
3		<i>Autonomous</i>						<i>Dependent</i>		
2										
1								A	H	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

A = Kebijakan yang bersifat top down

B = Lemahnya komitmen aparat pemerintah

C = Ketidakterlibatan lembaga dalam perencanaan awal

D = Lemahnya pengorganisasian

E = Rendahnya kualitas SDM

F = Lemahnya pembinaan/pelatihan

G = Lemahnya control sosial

H = Lemahnya peran kelompok tani

I = Konflik/persaingan antar lembaga

J = Adanya sikap sektoral sentris

Gambar 4.7. *Driver Power-Dependent* penyebab lemahnya fungsi koordinasi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

1. *Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Koordinasi di posisi independent*

Hasil analisis *ISM* menunjukkan bahwa pada posisi *independent*, terdapat empat faktor yaitu 1) Lemahnya pengorganisasian, 2) Rendahnya kualitas SDM, 3) Lemahnya pembinaan/pelatihan dan 4) Adanya sikap sektoralisentris.

Faktor lemahnya pengorganisasian adalah merupakan salah satu faktor penyebab lemahnya fungsi koordinasi, hal ini terjadi karena rendahnya kualitas SDM serta kurangnya pembinaan dan pelatihan yang langsung diadakan di masyarakat mengenai Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

Kurangnya pembinaan/pelatihan terkait Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta merupakan salah satu penyebab lemahnya fungsi koordinasi. Hal ini biasanya terjadi karena pengelolaan kawasan hutan di Kota Parepare bukan menjadi program utama. Pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada petani tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga apa yang sudah diberikan tidak diaplikasikan dengan baik. Pembinaan dan pelatihan tentang kelembagaan terkait Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, masih kurang sehingga perlu dilakukan pelatihan/pembinaan untuk penumbuhan kebersamaan petani pengelola Kawasan hutan melalui pendekatan dinamika kelompok.

Faktor adanya sikap sektoralisentris merupakan faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi koordinasi, karena setiap lembaga itu saling membutuhkan seperti halnya dalam hal Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, ada beberapa lembaga yang harusnya terlibat seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, BP3K dan sebagainya.

2. *Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Koordinasi di posisi linkage*

Lemahnya fungsi koordinasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Hasil analisis *ISM* menunjukkan bahwa dari 10 faktor, ada 3 faktor yang mempengaruhi

lemahnya fungsi koordinasi di posisi *linkage* untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta yaitu (1) Lemahnya komitmen aparat pemerintah dan (2) Ketidakterlibatan lembaga-lembaga dari awal. (3) Konflik/persaingan antar lembaga. Ketiga faktor ini dapat dilihat pada posisi *DP-D* semuanya berada pada sektor *linkage*. Artinya ketiga faktor ini menyebabkan lemahnya fungsi koordinasi kuat dan keterkaitan dengan faktor lain kuat.

Faktor lemahnya komitmen aparat pemerintah adalah faktor yang cukup besar dalam menyebabkan lemahnya fungsi koordinasi, karena terkadang antara lembaga tidak terjalin suatu perjanjian yang bersifat mengikat, terkadang komitmen yang mereka buat sebatas tertulis tanpa ada dasar hukum yang kuat.

Faktor ketidakterlibatan lembaga-lembaga dari awal adalah merupakan faktor yang harus dikaji secara hati-hati, oleh karena faktor ini berada di posisi *linkage* sehingga faktor ini hubungannya dengan faktor lain sangat kuat begitu pula dengan kebergantungannya sehingga faktor ini bisa menyebabkan lemahnya fungsi koordinasi untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Lembaga-lembaga yang seharusnya ikut berperan dalam pengelolaan kawasan hutan dari awal penyusunan program rencana kegiatan sudah harus terlibat baik dalam pembuatan kebijakan maupun kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat berbuat sesuai dengan tupoksinya.

Konflik/persaingan antar lembaga merupakan faktor yang bisa menyebabkan lemahnya fungsi koordinasi untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, karena masing-masing lembaga membawa program masing-masing ke masyarakat tanpa melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, sehingga program tersebut tidak efektif dan efisien.

3. Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Koordinasi di posisi *dependent*

Pada posisi *dependent* terdapat 3 faktor yang merupakan penyebab lemahnya fungsi koordinasi, faktor tersebut adalah 1) Kebijakan yang bersifat *top down*, 2) Lemahnya kontrol sosial, 3) Lemahnya peran kelompok tani.

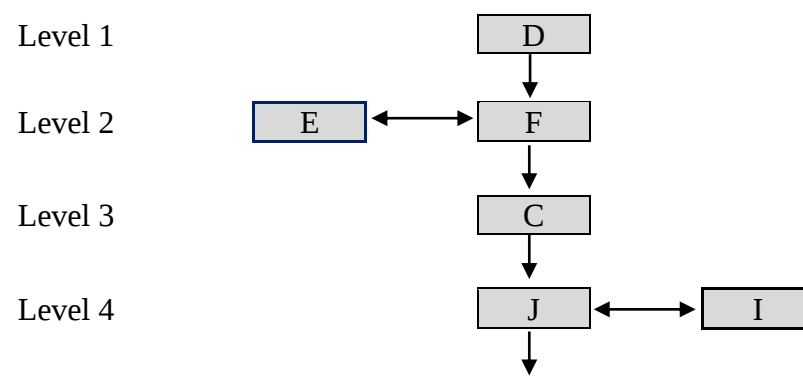
Kebijakan yang bersifat *top down* adalah merupakan faktor penyebab lemahnya fungsi koordinasi. Kebijakan pengelolaan Kawasan hutan harus ditangani melalui cara antara lain dengan memposisikan lembaga sektoral di kabupaten sebagai pemeran utama dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan tidak lagi bersifat *top down*. Seperti dalam penetapan harga hasil non kayu seperti gula merah, rotan, madu yang rendah sehingga merugikan pengelola Kawasan hutan.

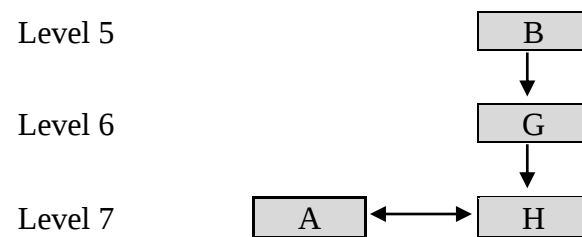
Lemahnya kontrol sosial merupakan faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi koordinasi, hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pelaku usaha tidak dilibatkan dari awal kegiatan sehingga mereka tidak mengetahui tahapan-tahapan kegiatan secara terperinci yang akan dilakukan.

Lemahnya peran kelompok tani merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya sebagai penyebab lemahnya fungsi koordinasi, hal ini terjadi karena pengorganisaian, pembinaan baik secara administrasi maupun bimbingan teknis dilapangan masih kurang sehingga petani belum memahami betapa pentingnya peranan mereka dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

4. Model Struktural Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Koordinasi untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

Untuk melihat keberkaitan faktor-faktor yang menjadi penyebab lemahnya fungsi koordinasi untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, maka disusun model struktural peran setiap lembaga seperti tersaji pada Gambar 4.8.





Keterangan:

- A** = Kebijakan yang bersifat top down
- B** = Lemahnya komitmen aparat pemerintah
- C** = Ketidakterlibatan lembaga dalam perencanaan awal
- D** = Lemahnya pengorganisasian
- E** = Rendahnya kualitas SDM
- F** = Lemahnya pembinaan/pelatihan
- G** = Lemahnya kontrol sosial
- H** = Lemahnya peran kelompok tani
- I** = Konflik/persaingan antar lembaga
- J** = Adanya sikap sektoralisentris

Gambar 4.8. Model struktur penyebab lemahnya fungsi koordinasi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

Gambar 4.8. menunjukkan bahwa (1) Lemahnya Pengorganisasian menduduki level kunci, yang berarti faktor ini paling besar pengaruhnya terhadap lemahnya fungsi koordinasi untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Selanjutnya (2) Rendahnya kualitas SDM dan (3) Lemahnya pembinaan/pelatihan berada pada level 2, (4) Ketidakterlibatan lembaga dalam perencanaan awal berada pada level 3, (5) Adanya sikap sektoralisentris dan (6) Konflik/persaingan antar lembaga berada pada level 4, (7) Lemahnya komitmen aparat pemerintah berada pada level 5, (8) Lemahnya kontrol sosial berada pada level 6, (9) Kebijakan yang bersifat top down dan (10) Lemahnya peran Kelompok Tani berada pada level 7.

Gambar 4.7. Dan Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa tiga faktor yang berada pada posisi linkage yang mana pengaruh maupun kebergantungan terhadap faktor lainnya besar. Artinya sebagai variabel penyebab sekaligus akibat terhadap lemahnya fungsi koordinasi atau variabel penghubung, harus dikaji secara hati-

hati yang berarti faktor-faktor pada posisi ini disamping berpengaruh besar terhadap lemahnya fungsi koordinasi, kebergantungan terhadap faktor lainnya juga besar. Oleh Karena itu guna mengefektifkan fungsi koordinasi untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, prioritas utama yang harus ditangani adalah satu faktor di posisi *independent*.

4.2.3. Program Strategi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

Hasil *ISM* menunjukkan bahwa dari 12 program strategi, 2 diantaranya sebagai program strategi untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Program strategi yang dimaksudkan yaitu 1) Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan petani dan 2) Jaminan harga hasil hutan. adalah merupakan faktor kunci (DP=12). Besarnya hubungan setiap program dapat diidentifikasi melalui besarnya frekuensi daya penggerak (*driver power*) dan ketergantungannya (*dependence*) seperti pada Tabel berikut:

Tabel 4.7. *Reachability Matrix* Program strategis potensi pengembangan Bidang Agroforestri Berbasis Agribisnis.

		Sub elemen J												DP	R
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Sub elemen i	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	3
	B	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
	C	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	8	4
	D	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	8	4
	E	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	10	3
	F	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	6
	G	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	2
	H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11	2
	J	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	10	3
	K	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
	L	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	6	5
DP		10	12	9	10	9	11	8	6	6	8	4	9		
R		3	1	4	3	4	2	5	6	6	5	7	4		

Keterangan:

- A** = Pengefektifan koordinasi antar lembaga
B = Penerapan teknologi
C = Pengefektifan penyuluhan lapangan
D = Peningkatan pengetahuan dan keterampilan
E = Pengefektifan peran lembaga pemerintah
F = Penguatan fungsi kontrol
G = Peningkatan partisipasi masyarakat
H = Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani
I = Peningkatan akses sumber daya modal
J = Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi
K = Jaminan harga hasil hutan
L = Pemberian reward bagi kelompok tani/petani yang berprestasi

Untuk melihat posisi program strategi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, dilakukan pemisahan ke 12 program strategi yang efektif melalui *matriks driver power-dependence* seperti tersaji pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.5 berikut:

Tabel 4.8. Posisi dan perbandingan bobot *DP-D* Program strategis dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

Posisi	Sub elemen	Bobot	
		<i>DP</i>	<i>D</i>
1. <i>Independent</i> (Daya dorong terhadap program kuat, sebaliknya ketergantungan terhadap sub elemen lainnya lemah)	1. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani	1,00	0,50
	2. Peningkatan akses sumber daya modal	0,92	0,50
	Rata-rata	0,96	0,50
2. <i>Linkage</i> (Daya dorong terhadap program kuat, dan ketergantungan terhadap sub elemen lainnya juga kuat)	1. Pengefektifan koordinasi antar lembaga	0,83	0,83
	2. Pengefektifan penyuluhan lapangan	0,67	0,75
	3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat	0,67	0,83
	4. Pengefektifan peran lembaga pemerintah	0,83	0,75
	5. Peningkatan partisipasi masyarakat	0,92	0,67
	6. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi	0,92	0,67
	7. Jaminan harga hasil hutan	1,00	0,58
	Rata-rata		
3. <i>Dependent</i> (Daya dorong terhadap program lemah, dan	1. Penerapan teknologi	0,50	1,00
	2. Penguatan fungsi kontrol	0,17	0,92
	3. Pemberian reward bagi kelompok tani/petani	0,17	0,75

sebaliknya ketergantungan terhadap sub elemen lainnya kuat)	yang berprestasi		
	Rata-rata		
4. <i>Autonomous</i> (Daya dorong terhadap program lemah, dan ketergantungan terhadap sub elemen lainnya juga lemah)	-	-	-
	Rata-rata	-	-

12						H	K					
11						I		G				
10								J	E	A		
9			<i>Independent</i>						<i>Linkage</i>			
8									C	D		
7												
6									L			
5												
4												
3			<i>Autonomous</i>							<i>Dependent</i>		
2											F	B
1												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:

A = Pengefektifan koordinasi antar lembaga

B = Penerapan teknologi

C = Pengefektifan penyuluhan lapangan

D = Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat

E = Pengefektifan peran Lembaga pemerintah

F = Penguatan fungsi kontrol

G = Peningkatan partisipasi masyarakat

H = Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani

I = Peningkatana sessum berdaya modal

J = Penigkatan kuantitas dan kualitas produksi

K = Jaminan harga hasil hutan

L = Pemberian reward bagikelompoktani/petani yang berprestasi

Gambar 4.9. *Driver Power-Dependent* program strategis dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta

1. *Program Strategi di posisi independent*

Hasil analisis *ISM* menunjukkan bahwa pada posisi *independent*, terdapat dua program strategi seperti 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan 2) Peningkatan akses sumberdaya modal. Program strategi ini merupakan program yang sangat berhubungan dengan Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani merupakan program strategi yang dapat dilihat dari posisi bobot *DP* (1). Hal ini menunjukkan bahwa melalui pembinaan/pelatihan petani tentang bagaimana mengembangkan Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, petani dapat mengakses internet sehingga mereka dapat menemukan sendiri bagaimana cara pengelolaan hutan secara terintegrasi (*Agroforestry*). Selain itu peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani sangat penting sebab apapun program yang dicanangkan jika tidak teradopsi oleh petani, maka program tersebut akan berakhir dengan kegagalan.

Peningkatan akses sumberdaya modal ini juga sangat efektif seperti terlihat bobot *DP* (0,92), untuk itu pemerintah melakukan suatu program yang dapat membantu petani mengakses modal diperbankan melalui kegiatan sertifikasi lahan/kebun petani dengan tujuan sertifikasi tersebut akan digunakan sebagai agunan/jaminan di bank.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan Ketersediaan modal di posisi *independent* merupakan faktor kunci program strategi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

2. Program Strategi di posisi linkage

Hasil analisis *ISM* menunjukkan bahwa terdapat tujuh program strategi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Ketujuh program strategi tersebut tersaji menurut posisi *driver power-dependen* masing-masing adalah: (1) Pengefektifan koordinasi antar lembaga, (2) Pengefektifan penyuluhan lapangan, (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat, (4) Pengefektifan peran lembaga pemerintah, (5) Peningkatan partisipasi masyarakat, (6) Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi (7) Jaminan harga hasil hutan.

Ketujuh program strategi tersebut berdasarkan analisis *ISM* berada di posisi *linkage* seperti ditunjukkan pada Tabel 4.7 yaitu sebagai program dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, sangat kuat dan keterkaitannya dengan program strategi lain juga besar. Sebagai program strategi yang memiliki rata-rata bobot $DP = 0,83$ dan $D = 0,73$ (Tabel 4.7). Besarnya bobot DP merupakan indikator bahwa ketujuh program strategi di posisi ini memiliki efektifitas yang sangat penting dalam pengelolaan hutan tanaman rakyat. Demikian pula besarnya bobot D menunjukkan besarnya ketergantungan terhadap program strategi lain dalam pengelolaan Kawasan hutan.

Pengefektifan koordinasi antar lembaga dengan bobot DP (0,83), merupakan salah satu program strategi yang efektif dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, kegiatan *Agroforestry* sangat diharapkan untuk dilaksanakan dalam pengelolaan hutan tanaman rakyat agar lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ini dapat berjalan beriringan sehingga tercapai target dari masing-masing lembaga.

Pengefektifan penyuluhan lapangan merupakan program strategi yang efektif karena dengan teknik penyuluhan yang fokus pada satu komoditi yang diusahakan oleh petani mulai dari budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran sehingga petani bisa ahli dan trampil pada komoditi yang diusahakannya. Peningkatan partisipasi masyarakat juga merupakan program strategi dalam

Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat dan Pengefektifan penyuluhan di lapangan serta peningkatan partisipasi masyarakat dengan bobot masing-masing DP (0,83). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat perlu dilakukan terutama dalam hal penguasaan materi, keterampilan penggunaan komputer dan kemampuan mengakses internet. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan memudahkan pelaksanaan program dan menjadi kontrol bagi pelaksanaan program pemerintah.

Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi merupakan salah satu program strategi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta dengan bobot DP (0,92). Jaminan harga hasil hutan juga merupakan program strategi yang paling menentukan dalam pengelolaan hutan tanaman rakyat karena dengan adanya jaminan harga maka petani menjadi lebih termotivasi untuk mengelolah Kawasan hutan ini dengan baik dan pedagang pengumpul atau tengkulak tidak akan mempermainkan harga hasil-hasil hutan yang diusahakan oleh petani.

3. *Program Strategi di posisi dependent*

Hasil analisis *ISM* menunjukkan bahwa ada 3 program strategi yang daya efektifitasnya dalam pengelolaan hutan tanaman rakyat yaitu 1) Penerapan teknologi 2) Penguatan fungsi control, (3) Pemberian reward bagi kelompok tani/petani yang berprestasi. Ketiga program strategi ini memiliki bobot rata-rata $DP = 0,28$ dan $D = 0,89$.

Kecilnya DP merupakan indikasi lemahnya peran dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, sedangkan D menunjukkan bahwa kebergantungannya pada lembaga lain besar. Lemahnya efektifitas program strategi tersebut dapat dibangkitkan melalui besarnya kebergantungannya terhadap program strategi lainnya. Artinya efektifitas program strategi tersebut dalam Potensi Pengembangan Bidang

Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta ditimbulkan melalui pengaruh program strategi lain.

Penerapan teknologi dengan bobot *DP* (0,50) merupakan program strategi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Artinya dengan menerapkan teknologi yang terkini/modern dalam mengelola kegiatan usahatani di lokasi hutan, maka petani dapat menghasilkan produk aneka hasil hutan yang dengan kuantitas dan kualitas tinggi sehingga harga jual akan tinggi pula, otomatis pendapatan petani bertambah/meningkat. Petani yang tidak melakukan penerapan teknologi akan memperoleh harga jual yang rendah dibandingkan dengan petani yang melakukan penerapan teknologi.

Penguatan fungsi kontrol walaupun dengan bobot *DP* kecil (0,17) namun merupakan program strategi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Ketidakjelasan kontrol dalam pelaksanaan pemasaran aneka hasil hutan menyebabkan harganya ditentukan oleh tengkulak.

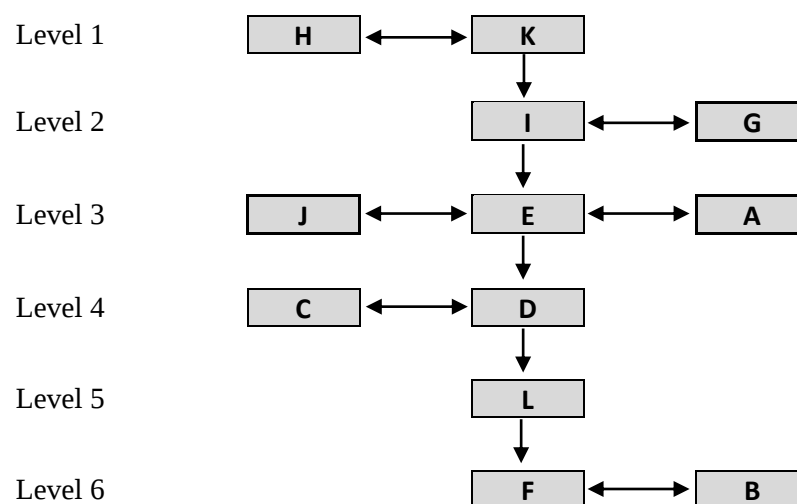
Pemberian *reward* bagi petani yang mencapai produktivitas tertinggi merupakan program strategi yang sangat berhubungan dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Program strategi ini merupakan program yang paling menentukan untuk Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, karena program strategi tersebut dapat memacu dan memotivasi petani untuk mengelola usahatannya dengan lebih baik sehingga otomatis dapat meningkatkan produksi aneka hasil hutan dan pendapatan petani.

Pemberian *reward* bagi petani pengelola Kawasan hutan dapat berupa uang yang dapat digunakan dalam kegiatan usahatannya atau paket jalan-jalan ke daerah pengembangan kegiatan *agroforestry* baik dalam negeri maupun luar negeri. Walaupun dengan pemberian *reward* ini kesannya memanjakan petani tetapi tidak ada salahnya pemerintah memberikan *reward* sebagai penghargaan atas usaha petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

4. *Model Struktural Program strategi dalam potensi pengembangan bidang agroforestry berbasis agribisnis di Kawasan hutan Kota Alitta*

Untuk melihat keberkaitan program strategi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, disusun model struktural setiap program strategi seperti tersaji pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10. menyajikan urutan posisi program strategi sehingga dapat ditunjukkan urutan masing-masing efektifitas program strategi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, yaitu 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan 2) Jaminan harga hasil hutan pada level kunci yakni sebagai program strategi yang paling efektif dalam pengelolaan hutan tanaman rakyat dan berada diposisi *independent* dan *linkage* di Level 1. Selanjutnya menyusul 3) Peningkatan akses sumberdaya modal dan 4) Peningkatan partisipatif masyarakat di Level 2, 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi 6) Pengefektifan peran lembaga pemerintah dan 7) Pengefektifan koordinasi antar lembaga di Level 3, 8) Pengefektifan penyuluhan lapangan, dan 9) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat di Level 4, 10) Pemberian reward bagi kelompok tani/petani yang berprestasi di Level 5. 11) Penguatan fungsi kontrol dan 12) Penerapan teknologi di Level 6.



Keterangan:

A = Pengefektifan koordinasi antar lembaga

B = Penerapan teknologi

C = Pengefektifan penyuluhan lapangan

D = Peningkatan pengetahuan dan keterampilan

- E** = Pengefektifan peran lembaga pemerintah
- F** = Penguatan fungsi kontrol
- G** = Peningkatan partisipasi masyarakat
- H** = Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani
- I** = Peningkatan akses sumber daya modal
- J** = Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi
- K** = Jaminan harga hasil hutan
- L** = Pemberian reward bagi kelompok/petani yang berprestasi

Gambar 4.10. Model struktur program strategis dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi lapangan dan hasil analisis ISM serta pembahasan studi empirik, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Topografi Hutan Kota Alitta dengan rata-rata kemiringan lereng curam (20-40 mdpl), iklim tipe B (hujan kering), jenis tanah *dystropepts*, merupakan areal potensial dalam hal potensi pengembangan bidang agroforestry berbasis agribisnis. Adapun karakteristik hutan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini dalam kondisi tidak berwujud hutan.
2. Deskripsi Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, sebagai berikut:
 - a. Lembaga-lembaga pemeran utama dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta adalah (1) KPHL Unit III Bila, (2) BP3K, dan (3) Kelompok tani, ketiganya menjadi lembaga pemeran kunci. Sedangkan lembaga seperti Desa/Kelurahan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Wilayah XV Makassar dan Kantor Lingkungan Hidup merupakan lembaga yang berperan dan cukup berpengaruh dalam pengelolaan lahan pada Kawasan hutan.
 - b. Faktor utama penyebab lemahnya fungsi koordinasi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, disebabkan oleh: (1) Lemahnya komitmen aparat pemerintah (2) Ketidakterlibatan lembaga dalam perencanaan awal. (3) Persaingan antar lembaga.
 - c. Program strategi yang paling efektif dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta adalah (1) Pengeftifan koordinasi antar lembaga (2) Pengektifan penyuluh lapangan (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat (4) Pengektifan peran lembaga pemerintah (5) Peningkatan partisipasi masyarakat (6) Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi (7) Jaminan harga hasil hutan.

5.2. Saran dan Rekomendasi

5.2.1. Saran

Pengelolaan kawasan hutan alitta dalam bidang agribisnis, guna mendukung program pemerintah daerah yaitu untuk menjaga kelestarian hutan alittan dan juga mampu meningkatkan pendapatan petani agribisnis menuju kesejahteraan, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pengelola hutan alitta untuk menjadikan kegiatan pengelolaan hutan sebagai salah satu kegiatan yang terstruktur bidang agroforestri berbasis agribisni yang dapat ditingkatkan pengelolaannya dan akses pemasarannya melalui optimalisasi peran setiap lembaga-lembaga terkait dan masyarakat sekitar pengguna lahan kawasan hutan alitta.
2. Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPT KPH Bila Unit III memfasilitasi pengelola hutan mengakses modal melalaui sistem kerjasama antara lembaga-lembaga pemeran, diantaranya Gapoktan/kelompok tani, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Unit usaha/koperasi.
3. Dinas Kehutanan Provinsi yang menjadi salah satu lembaga pemeran dalam pengelolaan hutan yang kebijakannya langsung dari pemerintah pusat harus intens dalam menjalankan program pengelolaan hutan bidang agroforestri berbasis agribisnis.

5.2.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap stakeholder maupun Pemerintah Daerah sebagai bagian dari fungsi koordinasi dan pengawasan Hutan Kota Alitta yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani merupakan program strategi yang sangat disarankan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa

melalui pembinaan/pelatihan petani tentang bagaimana mengembangkan Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, petani dapat mengakses internet sehingga mereka dapat menemukan sendiri bagaimana cara pengelolaan hutan secara terintegrasi (Agroforestry). Selain itu peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani sangat penting sebab apapun program yang dicanangkan jika tidak teradopsi oleh petani, maka program tersebut akan berakhir dengan kegagalan.

2. Peningkatan Akses Dan Sumber Daya Modal

Peningkatan akses sumberdaya modal ini juga sangat efektif, untuk itu pemerintah melakukan suatu program yang dapat membantu petani mengakses modal diperbankan melalui kegiatan sertifikasi lahan/kebun petani dengan tujuan sertifikasi tersebut akan digunakan sebagai agunan/jaminan di bank.

3. Pengefektifan Koordinasi Antar Lembaga

Pengefektifan koordinasi antar lembaga merupakan salah satu program strategi yang efektif dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta, kegiatan *Agroforestry* sangat diharapkan untuk dilaksanakan dalam pengelolaan Kawasan hutan agar lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ini dapat berjalan beriringan sehingga tercapai target dari masing-masing lembaga.

4. Pengefektifan Penyuluhan Lapangan

Pengefektifan penyuluhan lapangan merupakan program strategi yang efektif karena dengan teknik penyuluhan yang fokus pada satu komoditi yang diusahakan oleh petani mulai dari budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran sehingga petani bisa ahli dan trampil pada komoditi yang diusahakannya. Peningkatan partisipasi masyarakat juga merupakan program strategi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta.

5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Produksi

Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi merupakan salah satu program strategi dalam Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri berbasis Agribisnis di Kawasan Hutan Kota Alitta. Jaminan harga hasil hutan juga merupakan program strategi yang paling menentukan dalam pengelolaan hutan tanaman rakyat karena dengan adanya jaminan harga maka petani menjadi lebih termotivasi untuk mengelolah Kawasan hutan ini dengan baik dan pedagang pengumpul atau tengkulak tidak akan mempermainkan harga hasil-hasil hutan yang diusahakan oleh petani.

6. Jaminan Harga Hasil Hutan

Jaminan harga hasil hutan adalah suatu kebijakan atau mekanisme yang bertujuan untuk menjamin stabilitas harga produk-produk hasil hutan, seperti kayu, rotan, dan produk non-kayu lainnya. Tujuan utama dari jaminan harga ini adalah untuk melindungi para petani hutan, pengusaha hutan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan dari fluktuasi harga yang ekstrem di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Agus Wibowo Dwi Saputro, 2012. Modal Sosial dan Persepsi Masyarakat Dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sekolah Pascasarjana IPB.
- Alif K. Sahide, et al (2016). Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Fakultas Kehutanan & Balai Perhutanan Sosisal dan Kemitaan Lingkungan Wilayah Sulawesi.
- Alwasilah, C. 2008. Filsafat Bahasa dan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- AR Syamsuddin, dan Damaianti S Vismaia. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
- Ardi, 2012. Pengembangan Institusi Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Pola Agroforestri (Studi Kasus Lamban Sigatal, Kabupaten Sarolangun Jambi). Sekolah Pascasarjana IPB.
- Awang SA. 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Yogyakarta: Centre Forn Critical Social Studies dan Kreasi Wacana.
- Awang, S.A., 2003. Prinsip Dasar Analisis Kelembagaan dalam Usaha Perhutanan Rakyat, dalam Jurnal Hutan Rakyat Volume V No. 2 Tahun 2003. Pusat Kajian Hutan Rakyat. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta
- Bambang Hendroyono, 2014. Arah Kebijakan dan Evaluasi Pembangunan HTR (paparan pada rapat pembahasan percepatan pembangunan HTR 2014). Ditjen BUK.
- Borg, W.R and Gall, M.D. (2003). Educational Research: An Introduction 4 th Edition. London: Longman Inc.
- Bramasto Nugroho, 2010. Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat.
- Creswell W. John. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawati. 2012. Pengaruh Sistem Olah Tanah dan Pupuk P Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kedelai (*Glycine max* (L) Merrill). Jurnal Agrium Vol. 17 No.3

- Departemen Kehutanan. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2014-2025. Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan. Jakarta: Badan Planologi Kehutanan
- Dewi Febriani, 2011. Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sekolah Pascasarjana IPB, Ditjen BUK, 2011. Road Map Pembangunan Industri Kehutanan Berbasis Hutan Tanaman. Kemenhut.
- Didu MS. 2001. Analisis Posisi dan Peran Lembaga Serta Kebijakan Dalam Proses Pembentukan Lahan Kritis; Jurnal Teknologi Lingkungan. Volume 2. Nomor 1. Januari 2001. ISSN 1411-318X. hlm.93-105
- Djogo, dkk. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestry. World Agroforestry Centere (ICRAF). Bogor
- Endang Pujiastuti, 2011. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sekolah Pascasarjana IPB.
- Haruni dkk, 2011. *Paraserianthes falcataria*(L.) Nielsen Ekologi, Silvikultur dan Produktivitas. CIFOR.
- Hasan. 2010. Pengaruh Jenis Media Tanam dan Letak Biji Dalam Buah terhadap Pertumbuhan Bibit Pepaya (*Carica Papaya L.*). Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus
- Hendroyono, Bambang; Supriyono, Bambang; Wijaya, Andy Fefta; Muhammad, F. (2015) 'Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) of The Implementation of HTR Policy in Indonesia', *Journal of Law Policy and Globalization*, 44, pp. 23–29
- Herman. (2015). *Pengelolaan Hutan Lestari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.\
- Kemenhut, 2014. Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013.
- Marwoto. 2012. Peranan modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat (kasus di Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Mayrowani, H., dan Ashari, 2011. Pengembangan Agroforestry Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), pp. 83 - 98.
- Mayrowani, Henny dan ashari. (2011).Pengembangan agroforestri untuk mendukung ketahanan pangan dahn pemberdayaan petani sekitar hutan. *Posat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian*. Volume 29 No.2 Desember 2011:83-98

- Mukrimin. 2013. Pengaruh Waktu Pemberian dan Dosis Pupuk Daun (Gandasil D) terhadap Pertumbuhan Tanaman Jati (*Tectona grandis*) di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ohorella, S. 2016. Mengenal Keragaman Agroforestri dan Kelembagaan Di Maluku. Kelembagaan DAS. <https://kelebagaandas.wordpress.com/kelembagaan-agroforestri/syarif-ohorella>. Diakses tanggal 23 Maret 2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahannya
- Putri, D. P. N. (2012) Partisipasi Kelompok Tani dalam Program Hutan Kemasyarakatan (Studi pada Kelompok Tani Hutan Tani Manunggal dan Sumber Wanajati III, Playen, Gunung Kidul. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Rangkuti, F. (2018) Teknik Membadah Kasus Bisnis Analisis SWOT. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Said, E. Gumbira dan A. Haritz Intan. 2004. Manajemen Agribisnis. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Saragih, Bungaran. 2010. Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Bogor: IPBpress
- Setiana, H. 2012. Strategi Pengembangan Kelembagaan Bidang Agroforestry Di wilayah Bkph Tanggung Kph Semarang. Program Pascasarjana Undip
- Subagyo, H., Nata, S. Dan Agus, B. S. 2010. Tanah-tanah pertanian di Indonesia. Bogor: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. 78-80hal.
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta
- Suryani, Erna dan Ai Dariah. 2012. Peningkatan Produktivitas Tanah Melalui Sistem Agroforestri. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Jl. Tentara Pelajar No.
- Swasta DBH dan Sukotjo W. 2000. Sistem Pendukung Keputusan: Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syahyuti, 2003. Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian di Lebak. Pusat penelitian dan Pengembangan Sosek Pertanian Departemen Pertanian. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 2, Halaman 25-41.
- Tuti Herawati, 2011. Hutan Tanaman Rakyat: Analisis Proses Perumusan Kebijakan dan Rancang Bangun Model Konseptual Kebijakan. Sekolah

Pascasarjana IPB. www.lapor.ukp.go.id/id/26588/realisasi-hutan-tanaman-rakyat-%28htr%29-tersendat-di-asahan.html

Yohanes. 2004. Pengembangan Agroindustri Sebagai Penggerak Pembangunan Desa. Prosiding Agroindustri Faktor Penunjang Pembangunan Pertanian Di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

Peraturan PerUndang-undangan

....., 2013. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.

Anonimus, 1999. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Badan Pusat Statistik. (2021). KOTA PAREPARE DALAM ANGKA 2021

Departemen Kehutanan. 2016. P.83/MENLHK-II/Tentang Perhutanan Sosial Bab II Mengenai Hutan Desa

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.88/Menhut- II/2011, tentang Wilayah KHP di Sulawesi Selatan.

KPH Menlhk. Simpasdok KPH. 2019. <http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/>. Diakses tanggal 25 Maret 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/ Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan

Peraturan Menteri Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Prosedur Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan